

**EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI PENGUNSI ERUPSI GUNUNG
SINABUNG DI DESA SIOSAR KECAMATAN MEREK KABUPATEN
KARO PROVINSI SUMATERA UTARA**

(Skripsi)

Oleh

Yessi Yolanda Sarah



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI PENGUNGGSI ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI DESA SIOSAR KECAMATAN MEREK KABUPATEN KARO SUMATERA UTARA

Oleh

YESSI YOLANDA SARAH

Gunung api Sinabung merupakan Gunung api Strato yang secara administratif terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dengan ketinggian 2450 Meter diatas permukaan laut. Sejak letusan pada tahun 2010 mengakibatkan warga sekitar Gunung Sinabung harus mengungsi ke tempat penampungan korban bencana alam. Pemerintah mengeluarkan kebijakan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebagai salah satu kebijakan penanggulangan bencana. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dan dinilai berdasarkan indikator efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan kebijakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi kebijakan relokasi pengungsi erups Gunung Sinabung di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten karo, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan terdapat lima orang informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan evaluasi kebijakan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara melalui empat aspek. Pertama, kebijakan relokasi dievaluasi dari segi konteks kebijakan dinilai sudah tercapai namun dukungan lingkungan yang kurang baik. Kedua, evaluasi masukan kebijakan tercapai pedoman kebijakan, ketersediaan lahan, efektifitas, efisiensi dan kecukupan anggaran dalam perencanaan relokasi, ke. Ketiga, evaluasi proses kebijakan dikatakan belum tercapai dilihat dari penyelesaian kebijakan melebihi batas waktu yang ditentukan.

Keempat, evaluasi hasil kebijakan sudah tercapai dilihat dari hasil kebijakan di lapangan sesuai dengan direncanakan yaitu pembangunan pemukiman penduduk, lahan pertanian, sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Relokasi, Bencana Alam.

ABSTRACT

POLICY EVALUATION OF SINABUNG MOUNTAIN ERUPTION REFUGEES RELOCATION IN VILLAGE SIOSAR, SUB DISTRICTS MEREK, DISTRICTS KARO, NORTH SUMATRA PROVINCE

By

YESSI YOLANDA SARAH

Sinabung volcano is a stratovolcano mountain which administratively located in Village Siosar, Sub Districts Merek, Districts Karo, North Sumatra Province with high 2450 meters above sea level. Since the eruption in 2010 resulted residents around Mount Sinabung had to evacuate to shelters of natural disasters. The governments issued a sinabung eruption refugees relocation policy in Village Siosar, Sub Districts Merek, Districts Karo, North Sumatra Province as one of disaster management policy. This research using CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model and observed based on effectiveness, efficiency, adequacy, grading, responsiveness and policy accuracy.

The purpose of this research was to describe policy evaluation of Sinabung Mountain refugees relocation in Village Siosar, Sub Districts Merek, Districts Karo, North Sumatra Province. This research uses descriptive methods with qualitative approach. This research conducted in the Desa Siosar, Kecamatan merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara and there are five informants.

The result of this research shows the evaluation of Sinabung Volcano eruption refugee policy in Village Siosar, Sub Districts Merek, Districts Karo, North Sumatra Province. First, relocation policy evaluated in policy context already achieved. Second, The input evaluation policy achieved looked from clear implementation policy guidance. Third, policy process evaluation is not achieved looked from settlement policy over time limit that already determined.

Fourth, evaluation policy result achieved seen from policy result in the field accordance with planning namely the development of human settlements, agricultural land, facilities and and infrastructure.

keyword : evaluation of policy, relocation, natural Disaster

**EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI PENGUNSI ERUPSI GUNUNG
SINABUNG DI DESA SIOSAR KECAMATAN MEREK KABUPATEN
KARO SUMATERA UTARA**

Oleh

Yessi Yolanda Sarah

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

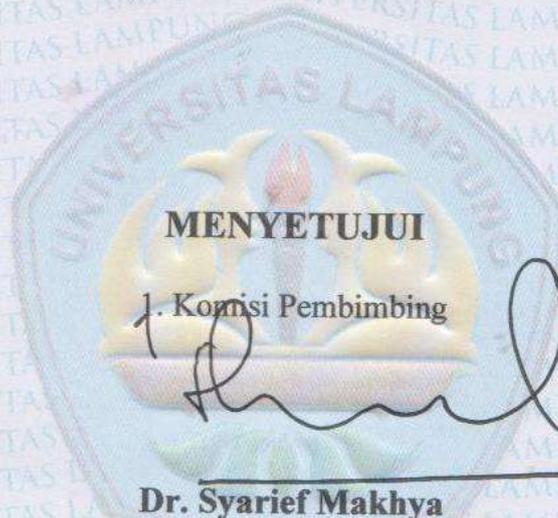
Judul Skripsi : **EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI PENGUNGGSI
ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI DESA SIOSAR
KECAMATAN MEREK KABUPATEN KARO
SUMATERA UTARA**

Nama Mahasiswa : **Yessi Yolanda Sarah**

No. Pokok Mahasiswa : **1216021115**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

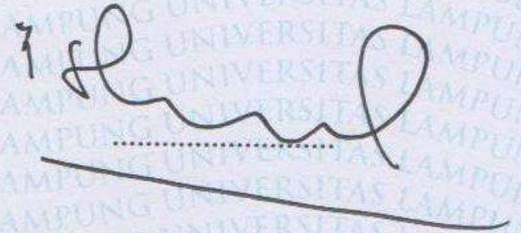
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

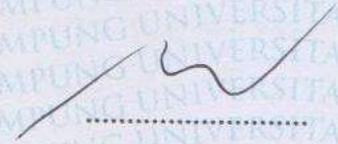
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Syarief Makhya**



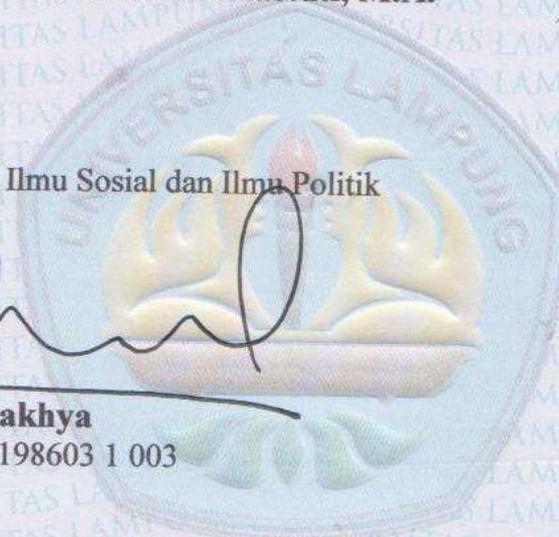
Penguji : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian : **05 Desember 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Desember 2016
Yang Membuat Pernyataan,



Yessi Yolanda Sarah
NPM. 1216021115

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo pada Tanggal 20 September 1994. Penulis merupakan putri pertama dari pasangan Bapak Darma Tarigan dan Ibu Tuti Dewi br Perangin-angin serta memiliki satu adik laki-laki Chandra Firdaus Tarigan.

Pendidikan yang pernah ditempuh adalah pada tahun 2000 penulis mengawali pendidikannya di TK Methodist Berastagi, Sumatera Utara selama satu tahun. Pada tahun 2006 penulis menyelesaikan studi di SD Methodst Berastagi, Sumatera Utara. Pada tahun 2009 penulis menyelesaikan pendidikan di SMP Methodist Berastagi, Sumatera Utara dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kabanjahe dengan tahun kelulusan pada tahun 2012. Pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mellau seleksi jalur SNMPTN.

Selama menjadi mahasiswi Universitas Lampung, penulis aktiff dalam kegiatan eksternal dan internal kampus.pada tahun 2013-2015 penulis kenjabat sebagai koordinator bidang dana dan usaha IMKA (Ikatan Mahasiswa Karo) Rudang Mayang Lampung dan dilanjutkan pada tahun 2015-2016 menjabat sebagai anggota bidang hubungan masyarakat IMKA Rudang Mayang Lampung.

MOTTO

*Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan
(Amsal 1:7)*

*Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk TUHAN dan bukan untuk manusia
(Kolose 3:23)*

*Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir
(Pengkotbah 3:11)*

**Kulakukan semuanya yang ku bisa selebihnya BAPA ku yang akan menyelesaikannya bagiku
(Yessi Yolanda Sarah)**

**Bukan beban yang ringan, melainkan bahu yang kuatlah yang kita perlukan
(Yessi Yolanda Sarah)**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karyaku ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Bapaku, Yesus Kristus atas segala hikmat dan berkatNya serta dengan kerendahan hati kupersembahkan karyaku ini kepada orang – orang terkasih

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada

Ayahanda ku Darma Tarigan dan Ibunda ku Tuti Dewi Br Perangin-angin serta keluarga besarku yang sangat mendukung, mebantu dan mengerti aku selama proses pendidikanku hingga aku menyelesaikan karya ini. Terimakasih atas segala doa, pengorbanan, motivasi dan nasehat yang menguatkan aku untuk menyelesaikan proses pendidikanku di Universitas Lampung.

Terimakasih untuk Saudara-saudari dan sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga kebaikan yang telah dilakukan mendapat Berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.

...Serta...

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah Bapaku yang luar biasa karena hikmat dan anugerah-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “**Evaluasi Kebijakan Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung di Desa Siosar Kecamatan Merek Kabupaten Karo Sumatera Utara**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna., sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung serta selaku pembimbing telah sabar membimbing dan memberikan kritik demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku pembahas dan penguji yang telah memberikan kritik dan saran, serta memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Darmawan Putba, S.Ip M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi pengarah bagi Penulis, selama Penulis menempuh studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih banyak untuk semua kata-kata motivasi yang membuat Penulis berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terimakasih atas kesediannya berdiskusi untuk membuka pikiran penulis dan menggali potensi Penulis lebih dalam lagi, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten karo, Ibu Dr.Sabrina Br Tarigan beserta seluruh staffnya selaku narasumber yang telah memberikan informasi kepada penulis.
8. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Bapak Drs.Jhonson Tarigan beserta seluruh staffnya yang sudah meluangkan waktu telah memberikan informasi kepada penulis.

9. Bapak Juri Ginting, Kasim Sitepu dan Selvi Alpiunika Br Surbakti dan seluruh masyarakat yang tinggal di Desa Siosar yang telah membantu dalam proses penelitian penulsi di lapangan.
10. Kedua orang tuaku, Ayahanda ku Darma Tarigan dan Ibunda Tuti Dewi Br. Perangin-angin yang senantiasa berdoa dan berusaha keras dalam segala keterbatasan untuk menjadikan Penulis sebagai seorang anak yang berpendidikan. Semoga ilmu yang didapatkan bisa menjadi bekal untuk membahagiakan Ayahanda dan Ibunda serta memberikan manfaat bagi banyak orang.
11. Adik-adikku Chandra Firdaus Tarigan dan Joy Efta Sembiring. Terimakasih untuk keceriaan, dan kebersamaan yang kalian ciptakan ketika Kakak sedang mengalami kelelahan dan kepenatan. Semoga kalian bisa melampaui jauh capaian yang telah kakak raih.
12. Kepada seluruh keluarga besar yang telah mendukung, membantu, mengerti dan memberikan kasih sayang sehingga penulis dapat melalui setiap proses kehidupan hingga hari ini dan menjalani perkuliahan hingga mencapai gelar Sarjana. Terimakasih kepada mereka yang terkasih yaitu mamauda Waspada Peranginangin, Bibik tua Lusua Br Sukatendel, Iting, Bulang, Karo dan semua yang tidak disebutkan namanya
13. Kepada kamu Hendire S Barus terimakasih untuk semangat, kesetiaan, kebersamaan, bimbingan dan motivasinya dalam membantuku menyelesaikan skripsi ini tiada kata yang bisa mewakili rasa terimakasihku. Aku berdoa agar kamu tetap semangat juga dalam menyelesaikan kuliah dan aku menunggu gelar S.Kom kamu.

14. Rumah kedua keluarga besar IMKA (Ikatan mahasiswa Karo) Rudang Mayang Lampung terkhususnya untuk angkatan 2012. Terimakasih untuk semangat, perjuangan dan kebersamaan kita; Hendire S B, Emia Br Sebayang, Bayu Sembiring, Oktanina Br Sembiring, Gagari Br Surbakti, S.H, Efranisa Br Ginting S.Pd, Juliandi Sinuhaji S.Ip, Infantri Sembiring, Steven Siregar, Berlian Br Sinulingga, Ina br Ginting, Jesica Pakpahan, Anta tarigan, Janwira Sembiring, Batinta Sembiring S.H. Kakak dan abang yang selalu memotivasi dan membimbing Mama uda Ricky Sinulingga, Impal Mangkok Eko Sinulingga, Iting Oktaviani Br Ginting, Bang Alpan, Bang turang Erik Nareba dan lainnya. Adik-adikku yang selalu memberikan dukungan my daughter Hosinta Surbakti, Loren Ginting, Riris Silalahi, Frans, JJ, Median, Okta Birong, dan juga adik-adik maba 2016 terimakasih buat kebahagiaan yang kalian semua berikan untuk mewarnai kehidupanku di tanah perantauan.

15. PERMATA GBKP Runggun Bandar Lampung terkhususnya dalam rekan sepelayananku dikepengurusan periode 2014-2016 terimakasih untuk ketuaku abang Aldo Ginting, untuk kedua kalinya bendaharaku Emia Br Sebayang, Mayditha Br Sinulingga, Kedua kalinya Janwira Sembiring, Impalku Rinaldo Jupen Pinem, Sialay Sukat Sembiring, abang Prandika Bangun, buk dokter Rachel Br Sitepu, Impal Infantri Sembiring, Agus Barus, adikku tersayang Hisa Audrina Br Ginting, adiku Oren Pance, Kristu dan juga Yosef terimakasih untuk kasih sayang, canda tawa, suka duka, susah senang yang mewarnai pelayanan kita, Semoga dari kebersamaan kita selama ini menumbuhkan iman dan buat yang belum

sarjana selalu semangat mencapai gelar sarjananya. Begitu juga untuk seluruh anggota PERMATA GBKP Bandar Lampung yang selalu mendoakanku adikku Eci, Rekha ade, melisa, desi, vero dan semuanya yang tidak disebutkan namanya.

16. Sahabat sepelayananku di Guru Sekolah Minggu GBKP Bandar Lampung, terimakasih untuk motivasi dan doanya, kakak ina pinem, eris surbakti, gabriel tarigan, kakak alin dan ulin br tarigan, bibik eta dan eti kaban, seluruh guru sekolah minggu yang tidak disebutkan namanya dan seluruh adik sekolah minggu yang aku sayangi.
17. Teman-teman KKN Desa Panca Marga, (Ribut, Marlya, Nugroho, Nay, wayan dan Iin). Terimakasih untuk pengalaman, kebersamaan dan motivasinya yang membuat Penulis berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga silaturahmi tetap terjalin.
18. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan 2012, dan adik-adik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terkhusus buat Ari, kety, Ubi, Mutiara, Lintang, Guntur, Ayu, dan yang lainnya. Terimakasih atas bantuan dan dukungan selama ini. Semoga silaturahmi tetap terjaga. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
19. Dan terakhir untuk seluruh rekan yang berpartisipasi, baik langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Bandar Lampung, Desember 2016

Yessi Yolanda Sarah

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Konsep Kebijakan Publik.....	11
1. Pengertian Kebijakan Publik	11
2. Tahap-tahap Kebijakan Publik	13
B. Konsep Evaluasi Kebijakan.....	17
1. Pengertian Evaluasi Kebijakan.....	17
2. Pendekatan Evaluasi	19
3. Tujuan Evaluasi Kebijakan	20
4. Model Evaluasi Kebijakan	22
5. Kriteria Evaluasi Kebijakan	23
6. Tipe Evaluasi Kebijakan Publik	24
C. Konsep Penanggulangan Bencana	25
1. Pengertian Bencana	25
2. Konsep Penanggulangan Bencana	26
3. Sistem Penanggulangan bencana	27
4. Upaya Penanggulangan Bencana	32
D. Konsep Relokasi.....	33
1. Pengertian Relokasi.....	33

2. Prosedur Pelaksanaan Relokasi	34
E. Kerangka Pikir	34
III. METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian	38
C. Kriteria Evaluasi.....	40
D. Lokasi Penelitian	42
E. Sumber Data	42
F. Penentuan Informan	44
G. Teknik Pengumpulan Data	45
H. Teknik Pengolahan Data	48
I. Teknik Analisis Data	49
J. Teknik Keabsahan Data	50
IV. GAMBARAN UMUM.....	54
A. Kondisi Umum Kabupaten karo.....	54
1. Geografis	54
2. Topografis	55
3. Hidrologi	55
4. Administratif	55
5. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo.....	57
B. Institusi dan Organisasi Pemerintahan kabupaten Karo	60
C. Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo.....	61
1. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Karo	62
2. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Karo	65
3. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Karo	65
4. Peta Rawan Bencana Gunung Sinabung Kabupaten Karo.....	76
5. Kondisi Umum Pengungsi Gunung Sinabung	78
D. Kondisi Umum Siosar	79
1. Sejarah Singkat Kawasan Siosar	80
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	83
A. Deskripsi Kebijakan Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung di Desa Siosar.....	83
1. Latar Belakang	83
2. Maksud dan Tujuan	86
3. Kebijakan	87
B. Evaluasi Kebijakan Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Di Desa Siosar.....	88
1. Konteks (Context) Kebijakan.....	90
a. Dukungan Lingkungan Fisik terhadap Program Relokasi....	91
b. Dukungan Masyarakat terhadap Program Relokasi	93
c. Dukungan Anggaran Pemerintah terhadap Program Relokasi	94
2. Masukan (input) Kebijakan	96

a. Pedoman Pelaksanaan Relokasi	97
b. Ketersediaan lahan Relokasi	98
c. Efektifitas Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sistem	100
d. Efisiensi Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sistem	101
e. Responsivitas Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sistem	103
f. Perataan dalam Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sistem.....	104
3. Proses (process) Kebijakan	108
a. Efektifitas Pelaksanaan Program Relokasi	109
b. Efisiensi Waktu Pelaksanaan Relokasi	112
c. Responsivitas Masyarakat terhadap Pelaksanaan Relokasi	118
4. Hasil (Product) Kebijakan.....	119
a. Hasil dan Kelayakan Pembangunan Bangunan Sarana dan Prasarana di Daerah Relokasi	120
b. Kecukupan Dana yang Digunakan	121
c. Efektifitas dan Efisiensi Dana yang Digunakan	122
d. Responsivitas Masyarakat sebagai Objek Kebijakan.....	125
e. Perataan Hasil Kebijakan.....	127
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN.....	139

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Progres Pembangunan Perumahan, Penyediaan Sumber Air, Penyediaan listrik dan Septick Tank Komunal Di Area Relokasi	5
2.	Pembangunan Jambur Desa, Kantor Desa dan Balai Desa (Pemerintahan)	5
3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana.....	5
4.	Penelitian Terdahulu	9
5.	Kriteria Evaluasi	41
6.	Informan Penelitian.....	45
7.	Karakteristik Geografis Kabupaten Karo.....	54
8.	Luas Wilayah Kabupaten Karo	56
9.	Persentasi Penggunaan Lahan Kabupaten Karo Tahun 2003 – 2013	57
10.	Data Jumlah SDM BPBD Kabupatewn Karo	63
11.	Data Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo.....	79
12.	Realisasi Pembangunan Jalan Di Desa Siosar	110
13.	Bangunan Relokasi Di Desa Siosar	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema Kerangka Pikir.....	36
2. Peta Kabupaten Karo.....	56
3. Struktur Institusi dan Organisasi Pemerintah Kabupaten Karo	61
4. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Karo.....	65
5. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Sinabung Kabupaten Karo	77
6. Kondisi Lahan di Desa Siosar	91
7. Ketersediaan Lahan di Desa Siosar.....	102
8. Gedung Serbaguna (Jambur).....	124
9. Rumah Hunian Penduduk	128

DAFTAR SINGKATAN

AD	: Angkatan Darat
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BT	: Bujur Timur
CIPP	: <i>Context, Input, Process, Product</i>
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DHS	: Daerah Hulu Sungai
DIPA	: Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSP	: Dana Siap Pakai
DTE	: <i>Descision Theoretic Evaluation</i>
Ha	: Hektare
HL	: Hutan Lindung
HP	: Hutan Produksi
ICS	: <i>Incident Command System</i>
KB	: Keluarga Berencana
KM	: Kilometer

KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
LU	: Lintang Utara
M	: Meter
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PKL	: Pusat Kegiatan Lokal
PPK	:Pusat Pelayanan Kawasan
PPAS	:Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPL	: Pusat Pelayanan Lingkungan
RKPD	: Rencana Kerja Pemerinta Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Satgas	: Satuan Tugas
SD	: Sekolah Dasar
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TNI	: Tentara Nasional Inonesia
UMKM	: Usaha Masyarakat Kecil Menengah
WIB	: Waktu Indoneisa bagian Barat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gunung api Sinabung merupakan Gunung api strato, secara administratif terletak di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan secara geografis terletak pada posisi $3^{\circ} 10'$ LU, $98^{\circ} 23,5'$ BT dengan ketinggian 2460 meter di permukaan laut. Karena tidak tercatatnya sejarah tentang aktivitasnya sejak tahun 1600, maka Gunung Api Sinabung dimasukkan kedalam gunung api tipe B. Peningkatan aktivitas vulkaniknya mulai tercatat sejak terjadinya erupsi freatik pada 27 Agustus 2010, yang mengakibatkan status Gunung Sinabung dinaikan dari gunung api tipe B menjadi tipe A yang berstatus awas (Level IV) pada 29 Agustus 2010. (Loeqman, 2010:46).

Sejak letusan pada tahun 2010 hingga Selasa 2 Juni 2015 pukul 23.00 WIB, Gunung Sinabung terus menunjukkan aktifitas vulkanik. Gunung Sinabung yang kian lama kian meningkatkan aktivitas vulkaniknya mengakibatkan warga disekitar Gunung Sinabung mau tidak mau harus mengungsikan diri ke penampungan. Sampai saat ini tercatat ada 9 tempat pengungsian untuk 13 desa yang terkena dampak letusan Gunung Sinabung. Desa yang terkena dampak letusan Gunung Sinabung yaitu Desa Sukameriah, Desa Simacem, Desa Bakerah, Desa Tiga Pancur,

Sukanalu, Pintu Mbesi, Sigaranggarang, Jeraya, Kuta Rayat, Kuta Gugung, Dusun Lau Baleng, Kuta Tengah dan Desa Mardinding. Hingga sekarang tercatat 9.325 jiwa pengungsi akibat letusan Gunung Sinabung . (www.Karokab.go.id Diakses pada 12 November 2015 pukul 20.00 WIB).

Sebagai daerah rawan bencana, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana sebelum atau setelah terjadinya bencana. Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. (Depkominfo, 2007: 12).

Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pascabencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi menjadi jaminan bagi korban bencana. Keseluruhan tindakan ini harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan penanganan bencana selama lima tahun bencana alam erupsi Gunung Sinabung. Salah satu diantaranya adalah instruksi Presiden Jokowi tentang relokasi pengungsi Gunung Sinabung yang dikeluarkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menindaklanjuti Surat Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu Keputusan Presiden itu, menerbitkan izin pinjam pakai kawasan Hutan Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, guna mempercepat relokasi korban pengungsi Sinabung. Sesuai salinan Fax Nomor: S.482/Menhut-II/2014, perihal permohonan pinjam pakai hutan Siosar untuk lahan pertanian korban erupsi Gunung Sinabung, pada prinsipnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak keberatan. Penggunaan lahan serta akses jalan pada kawasan hutan produksi tetap (HP) Siosar, dan hutan lindung (HL) sekitar 458,8 hektare. (<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/11/01/126947/pemkab-Karo-tindaklanjuti-instruksi-presiden-jokowi/#.VX3eH0ZfOJ8> (Diakses pada 12 Januari 2016 pukul 21.15 WIB).

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden tersebut terdapat beberapa target utama yang ingin dicapai yaitu :

1. Pembangunan area hunian tetap di area lokasi;
2. Pembangunan sarana dan prasarana di area relokasi, yang terdiri dari :

- a) Sarana ibadah;
- b) Sarana pendidikan;
- c) Sarana kesehatan;
- d) Sarana pemerintahan;
- e) Sarana jalan dan transportasi, dan;
- f) Sarana lain yang diperlukan;

3. Menyediakan lahan pertanian.

Target utama dalam surat keputusan presiden tersebut merupakan tugas yang harus dikerjakan oleh Satuan Tugas (Satgas) yang telah dipilih dalam surat keputusan presiden tersebut dan masa kerja untuk mencapai target ini diputuskan hingga tanggal 31 desember 2015. Pelaksanaan pembangunan pemukiman untuk relokasi pengungsi Gunung Sinabung ini dilakukan oleh BNPB dan dibangun oleh anggota 496 anggota TNI AD, tukang sipil 41 orang dan dibantu warga pengungsi berkisar 210 orang dibawah pengawasan Satuan Tugas Percepatan dan pemerintah Kabupaten Karo.

Berdasarkan laporan evaluasi oleh pemerintah Kabupaten Karo mengenai progres pelaksanaan relokasi pengungsi Gunung Sinabung di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Tahap I adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Progres Pembangunan Perumahan, Penyediaan Sumber Air, Penyediaan Listrik dan Septick Tank Komunal Di Area Relokasi.

No. (1)	Desa (2)	Target (3)	Progres (4)
1.	Desa Bekerah	112	100%
2.	Desa Sukameriah	128	100%
3.	Desa Simacem	130	100%

Sumber : Arsip Pemerintahan Kabupaten Karo, Tahun 2016

Tabel 2. Pembangunan Jambur Desa, Kantor Desa dan Balai Desa (Pemerintahan)

No. (1)	Desa (2)	Target (3)	Progres (4)
1.	Desa Bekerah	1 unit	10%
2.	Desa Sukameriah	1 unit	10%
3.	Desa Simacem	1 unit	10%

Sumber : Arsip Pemerintahan Kabupaten Karo, Tahun 2016

Tabel 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana

No (1)	Sarana (2)	Kegiatan (3)	Target (4)	Progres (5)
1.	Pendidikan	1. Pembangunan PAUD	3 unit	10%
		2. Pembangunan SD	1 unit	0%
2.	Kesehatan	1. Bangunan Puskesmas Pembantu	2 unit	10%
		2. Bangunan Paramedis	2 unit	10%
		3. <i>Meubeller</i> / Alat Kesehatan	2 paket	0%
		4. Sarana Prasarana dan Alkes		(<i>Ambulance</i> dan Tenda)
3.	Agama	1. Pembangunan Gereja	2 unit	1 (satu) unit Bantuan pihak ketiga sudah 100 % dan 1(satu) unit Gereja Katolik dari BNPB progress 5 %
		2. Pembangunan Masjid	1 unit	Progress 40 %
4.	Transportasi	Pengadaan angkutan perintis	2 unit	100%
5.	Sektor	Penyiapan Lahan Pertanian		

Pertanian (Ijin Pinjam Pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 416 Ha)	a. Penebangan Kayu	250Ha	190 Ha (251 Kavling)
	b. Pencetakan lahan	250 ha	Pematokan Lahan
	c. pembuatan jalan usaha tani	11,9Km	Progress 40 %
	Penyediaan Lahan Pertanian		
	a. Pengolahan lahan pertanian	66 Ha	53 Ha sudah dibagi ke Masyarakat

Sumber: Arsip Pemerintahan Kabupaten Karo, Tahun 2016

Hasil dari kinerja Satuan Tugas Percepatan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Desa Siosar terdapat beberapa ketidaktercapaian hasil kebijakan jika dilihat berdasarkan target pelaksanaan kebijakan ini. Pembangunan sarana dan prasarana di daerah relokasi belum selesai sampai waktu yang ditentukan yaitu tanggal 31 Desember 2015 seperti yang tertulis dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2015. Padahal sarana dan prasarana adalah kebutuhan yang mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat korban erupsi Gunung Dinabung di tempat relokasi.

Belum tersedianya sarana dan prasarana di tempat relokasi mengundang respon dari masyarakat enggan untuk pindah ke daerah relokasi dan tetap memilih tinggal di tempat pengungsian. Kebanyakan warga enggan pindah karena belum tersedia fasilitas yang memadai di lokasi, terutama lahan pertanian yang bisa dikerjakan. Fasilitas umum seperti tempat ibadah, warung, dan sekolah juga belum tersedia. Kebanyakan keluarga belum pindah karena anaknya masih bersekolah di dekat rumah sewa mereka. Warga yang tinggal di Siosar menyekolahkan anak di Desa Kacinambun,

desa terdekat dengan Siosar yang berjarak sekitar 8 kilometer.

([http://print.kompas.com/baca/2015/09/25/Warga-Bekerah-Enggan-](http://print.kompas.com/baca/2015/09/25/Warga-Bekerah-Enggan-Pindah%2c-Fasilitas-Relokasi-Belum-memadai//)

Pindah%2c-Fasilitas-Relokasi-Belum-memadai// Diakses pada 15 Januari

2015 pukul 21.35 WIB)

Terkait dengan penelitian diatas maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan konteks penelitian diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No (1)	Nama (2)	Judul (3)	Tahun (3)	Fokus (4)
	Syilvia Afista	Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Bencana di Kota Bandar Lampung	2015	Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : Sejauh mana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja BPBD Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Bencana di Kota Bandar Lampung, dilihat dari kelima indikator kinerja yakni produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja BPBD Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung dari segi produktivitas sudah baik, hal tersebut terlihat dari pelayanan BPBD Kota

				<p>Bandar Lampung kepada masyarakat Kota Bandar Lampung baik dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk pembangunan fisik yang dilakukan oleh BPBD Kota Bandar Lampung dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung, meskipun dalam input yang dimiliki oleh BPBD Kota Bandar Lampung terdapat keterbatasan dalam ketersediaan dana serta dalam ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kota Bandar Lampung masih terdapat beberapa peralatan yang dalam keadaan rusak ataupun hilang bahkan dalam kondisi 50 % kebawah yang sangat berpengaruh terhadap kinerja dari BPBD Kota Bandar Lampung.</p>
3	Nur Khotimah Suri	<p>Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo dalam Upaya Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo</p>	2016	<p>Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :</p> <p>(1) Untuk mengetahui kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung.</p> <p>(2) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung di Kabupaten Karo.</p> <p>(3) Untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut.</p> <p>Hasil penelitian</p>

				<p>menunjukkan bahwa : Kinerja BPBD Kabupaten Karo dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung, dilihat dari kelima indikator kinerja yakni produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja BPBD Kabupaten karo dalam penanggulangan Erupsi Gunung Sinabung belum optimal dilihat dari keterlambatan pembentukan BPBD Kabupaten Karo yang dibuat setelah bencana dan sebelumnya diambil alih oleh TNI-AD.</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi kebijakan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian di atas maka masalah dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : “Apakah tujuan kebijakan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Desa Siosar Kecamatan Merek Kabupaten Karo Sumatera Utara sudah tercapai?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi kebijakan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Desa Siosar Kecamatan Merek Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara akademik, hasil penelitian ini sebagai salah satu kajian Ilmu Pemerintahan khususnya di bidang kebijakan publik dalam aspek evaluasi kebijakan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Desa Siosar Kecamatan Merek Kabupaten Karo Sumatera Utara.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini sebagai evaluasi kebijakan Relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Sumatera Utara untuk memaksimalkan kinerja pemerintah dan lembaga yang terkait dalam relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Desa Siosar Kecamatan Merek Kabupaten Karo Sumatera Utara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut James Anderson (Agustino, 2006: 7) adalah serangkaian kegiatan yang memiliki maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut RS. Parker (Ekowati, 2015: 5) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis. Sedangkan menurut Anderson (Ekowati 2005: 5) dikatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga/badan-badan Pemerintah dan Pejabat-pejabatnya. Selanjutnya diungkapkan bahwa implikasi definisi dari pengertian ini adalah:

1. Bahwa kebijakan itu selalu memunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada maksud dan tujuan;
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan Pemerintah/Pejabat pemerintah;
3. Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan Pemerintah;

4. Bahwa kebijakan itu berdasarkan pada peraturan atau undang-undang yang bersifat memaksa;

Menurut Agustino (2006: 8) menyimpulkan beberapa karakteristik dari kebijakan publik yaitu:

1. Pada umumnya kebijakan publik ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu pada perilaku yang berubah atau acak;
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dimana keputusan yang terpisah-pisah;
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan;
4. Kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan akan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah sangat diperlukan;
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan tindakan yang bersifat memerintah.

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan konsep kebijakan publik yaitu sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Sejalan dengan pendapat David Easton (Agustino, 2006: 7) menyatakan kebijakan publik adalah keputusan politik yang dirumuskan sebagai otoritas dalam sistem politik yaitu para pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah yang memiliki otoritas dalam memformulasikan kebijakan publik dan mempunyai tanggung jawab

tertentu yang mengikat kepada anggota masyarakat dalam waktu tertentu.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:25-27) mengemukakan tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda kebijakan publik. sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk kedalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang lama. Anderson (Islamy, 2009: 86) menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan masalah dapat masuk ke dalam agenda pemerintah atau agenda para perumus kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antar kelompok (*group equilibrium*), maka kelompok-kelompok tersebut akan mengadakan reaksi dan menuntut tindakan pemerintah untuk mengambil prakarsa guna mengatasi ketidakseimbangan tersebut;

- 2) Para pemimpin politik, apakah didorong atas pertimbangan keuntungan politik, kepentingan umum atau kedua-duanya, selalu memerhatikan permasalahan umum, menyebarluaskan dan mengusulkan usaha-usaha pemecahannya;
- 3) Timbulnya krisis atau peristiwa yang luar biasa dapat pula menyebabkan masalah tersebut masuk kedalam agenda pemerintah;
- 4) Adanya gerakan-gerakan protes termasuk tindakan kekerasan;
- 5) Masalah-masalah khusus atau isu-isu politis yang timbul di masyarakat yang menarik perhatian media komunikasi yang menyebabkan masalah atau isu tersebut semakin menonjol.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah berasal dari beberapa alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah yang masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Islamy (2009: 92-98) pada tahap perumusan kebijakan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan anatar lain:

- 1) Mengidentifikasi alternatif;
- 2) Mendefinisikan dan merumuskan alternatif;
- 3) Menilai alternatif;
- 4) Memilih alternatif yang memuaskan;

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Berdasarkan banyaknya alternatif yang ditawarkan para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif. Konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan. Islamy (2009: 98) mengemukakan pada tahap adopsi kebijakan atau pengesahan kebijakan merupakan proses kolektif. Proses kolektif atau (*collective process*) adalah di mana berbagai macam pihak dari berbagai macam institusi terlibat dalam proses pembuatan keputusan dan pengesahannya. Pengesahan kebijakan sebagai suatu proses kolektif banyak dilakukan oleh badan legislatif. Meskipun, anggota badan legislatif banyak terlibat, akan tetapi pihak lainnya juga ikut berperan, yaitu wakil eksekutif, birokrat kelompok kepentingan, media massa dan sebagainya.

d. Tahap Implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni yang

dilaksanakan oleh badan-badan administrasi atau agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Islamy (2009: 107) menyebutkan bahwa suatu kebijakan akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan memiliki dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Pada tahap implementasi atau pelaksanaan kebijakan ini banyak pihak-pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan terutama eksekutif. Di samping itu juga perlunya peranan dari legislatif, yudikatif, kelompok-kelompok kepentingan termasuk warga negara.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Berdasarkan hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Islamy (2009: 112) mengemukakan evaluasi kebijakan atau penilaian kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses kebijakan. Penilaian kebijakan mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan.

Berdasarkan penejelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap kebijakan mulai dari tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, samapai terakhir tahap evaluasi kebijakan merupakan proses yang saling berkaitan. Proses dalam tahapan kebijakan tersebut bukan hanya melibatkan satu pihak, tetapi melibatkan pihak-pihak seperti eksekutif, birokrat, legislatif, yudikatif, kelompok-kelompok kepentingan serta masyarakat.

Tahap yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tahap evaluasi kebijakan karena melalui penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kinerja kebijakan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Desa Siosar Kecamatan Merek Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Tahap ini juga dapat memberi penilaian terhadap hasil dari kebijakan itu sendiri.

B. Konsep Evaluasi Kebijakan

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Arikunto (2005:10-11) mengemukakan evaluasi program sebagai “suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program” selanjutnya dalam perspektif evaluasi hasil belajar, menyatakan bahwa fungsi penilaian meliputi beberapa hal yaitu selektif, diagnostik, penempatan, pengukuran keberhasilan.

Menurut Dunn (2006: 608) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*apparsial*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Berdasarkan arti lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Menurut Siagian (1970: 143-144) istilah evaluasi diartikan sebagai penilaian, yaitu: “proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai”. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa hakikat dari penilaian itu adalah:

- a. Penilaian ditujukan kepada satu fase tertentu dalam satu proses setelah fase itu seluruhnya selesai dikerjakan. Berbeda dengan pengawasan yang ditujukan kepada fase yang masih dalam proses pelaksanaan. Secara sederhana dapat dikatakan dengan selesainya pekerjaan tidak dapat diawasi lagi karena pengawasan hanya berlaku bagi tugas yang sedang dilaksanakan.
- b. Penilaian bersifat korektif terhadap fase yang telah selesai dikerjakan. Mungkin akan timbul pertanyaan: Jika sesuatu telah selesai dikerjakan, nilai korektif yang diperoleh untuk apa? Korektifitas yang menjadi sifat dari penilaian sangat berguna, bukan untuk fase yang telah selesai, tetapi untuk fase berikutnya. Artinya, melalui penilaian harus dikemukakan kelemahan-kelemahan sistem yang dipergunakan dalam fase yang baru saja selesai itu. Juga harus dikemukakan penyimpangan - penyimpangan dan/atau penyelewengan-penyelewengan itu terjadi. Jika ini telah dilakukan, maka akan diperoleh bahan yang sangat berguna untuk dipergunakan pada fase yang berikutnya sehingga kesalahan-kesalahan yang dibuat pada fase yang baru diselesaikan tidak terulang, sehingga

dengan demikian organisasi tumbuh dan berkembang dalam bentuk tingkat *performance* yang lebih tinggi dan efisien yang semakin besar, atau peling sedikit, inefisiensi yang semakin berkurang.

- c. Penilaian bersifat *prescriptive*. Sesuatu yang bersifat *prescriptive* adalah yang bersifat mengobati. Setelah melalui diketemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pelaksanaan dalam fase yang lalu, setelah sumber-sumber yang menyebabkan mungkin penyimpangan dan/atau penyelewengan terjadi, melalui penilaian harus pula dapat diberikan rekomendasi untuk mengobati penyakit-penyakit proses itu penyakit yang sama tidak timbul kembali, dan sekaligus jika mungkin, dicegah pula timbulnya masalah yang baru.
- d. Penilaian ditujukan kepada fungsi-fungsi organik lainnya. Fungsifungsi administrasi dan manajemen itu tidak merupakan fungsi-fungsi yang berdiri sendiri dalam arti lepas dari fungsi-fungsi lainnya. Malahan sesungguhnya kelima fungsi organik administrasi dan manajemen itu merupakan satu rantai kegiatan dan masing-masing fungsi itu merupakan mata rantai yang terikat kepada semua mata rantai yang lain.

William Dunn (Agustino, 2006: 187) menyatakan secara sederhana evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat - manfaat hasil kebijakan. Ketika ia bernilai dan bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan kepada tujuan atau sasaran evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum.

2. Pendekatan Evaluasi

Pada pelaksanaan evaluasi menurut Dunn (2006: 613) terdapat tiga pendekatan yang dapat membedakan berdasarkan karakteristik nilai dan sistemnya, yaitu:

1. Evaluasi semu adalah suatu pendekatan evaluasi yang bersandarkan pada informasi/data yang bersifat self-efiden (dapat terbukti sendiri) dan tidak controversial, dan juga

- tidak dikaitkan secara spesifik dengan sistem nilai seseorang/kelompok orang dan tanpa berusaha mengetahui manfaat nilai tersebut terhadap suatu kelompok atau individu.
2. Evaluasi formal adalah suatu pendekatan evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi-informasi yang valid tentang hasil-hasil dari suatu kebijakan yang telah diumumkan oleh pembuat kebijakan program.
 3. *Decision Theoretic Evaluation* (DTE) adalah suatu pendekatan evaluasi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil kebijakan/program yang secara eksplisit dinilai oleh beberapa macam pelaku kebijakan.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah evaluasi formal.

(Dunn 2006: 613) Evaluasi formal menggunakan undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Asumsi utama dari kebijakan formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

3. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Terdapat enam hal tujuan evaluasi yang disampaikan Sudjana (2006: 48), yaitu untuk :

1. Memberikan masukan bagi perencanaan program;
2. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program;
3. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program;
4. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program;

5. Memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi, dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program.

Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar (2004: 13) menyatakan bahwa terdapat dua macam tujuan evaluasi yaitu

“Tujuan umum dan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing-masing komponen. Dalam hak tersebut keduanya menyarankan agar dapat melakukan tugasnya, maka seorang evaluator program dituntut untuk mampu mengenali komponen-komponen program”.

Badjuri dan Teguh Yuwono (2002: 132) menyatakan Evaluasi kebijakan setidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu :

1. Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya;
2. Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan;
3. Untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Sekalipun penerapan suatu kebijakan oleh pemerintah telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya, namun tidak selalu penerapan tersebut dapat mewujudkan semua tujuan yang hendak dicapai. Terganggunya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin pula disebabkan oleh pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya.

4. Model Evaluasi Kebijakan

Model evaluasi CIPP merupakan salah satu dari beberapa teknik evaluasi suatu program yang ada. Model ini dikembangkan oleh salah satu pakar evaluasi, Stufflebeam yang dikembangkan pada tahun 1971 dengan berlandaskan pada keempat dimensi yaitu dimensi context, dimensi input, dimensi process, dan dimensi product. Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan judgment mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi. (Badrujaman, 2009:66)

Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan (1967) di Ohio State University. CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu:

1. *Context Evaluation, to serve planning decision*, konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program.
2. *Input Evaluation, structuring decision*, evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber– sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan.
3. *Process Evaluation, to serve implementing decision* evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan, sampai sejauhmana rencana telah diterapkan.

4. *Product Evaluation, to serve recycling decision*, Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Contexts, Input, Process, Product* (CIPP) model. Model CIPP merupakan model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem (Arikunto, 2005:29). Tingkat kecocokan antara tujuan dan hasil pada setiap komponen yang dianalisis menunjukkan tingkat keberhasilan program secara keseluruhan.

5. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Sebuah kebijakan dapat dievaluasi melalui pengukuran kriteria evaluasi. Menurut Dunn (2006: 610) untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan/program maka perlu dibutuhkan adanya indikator kriteria. Jika ingin melakukan suatu evaluasi terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai penilaian kriteria tersebut yaitu :

1) Efektifitas

Kriteria penilaian ini berkenaan dengan apakah suatu program/kegiatan mencapai hasil/tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain efektifitas merupakan penilaian apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

2) Efisiensi

Penilaian kriteria ini selalu dikaitkan dengan jumlah usaha yang dikeluarkan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.

3) Kecukupan

Penilaian kriteria ini berdasarkan kepada seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai, atas kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan dampak dan manfaat program yang dilakukan.

4) Perataan

Suatu kriteria untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pada pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut menghasilkan lebih banyak distribusi yang adil dan wajar terhadap risorsis yang ada dalam masyarakat.

5) Responsifitas

Responsifitas berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan/program dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu. Pengukuran ini dilakukan melalui survey target grup.

6) Ketepatan

Kriteria ketepatan ini berhubungan dengan rasionalitas substantif untuk menilai apakah suatu program atau kebijakan memberi nilai atau manfaat.

Kriteria di atas akan dijadikan indikator penentu ketercapaian dari kebijakan yang dianalisis dalam penelitian ini. Kriteria di atas sejalan dengan fungsi dari evaluasi kebijakan (Dunn 2006: 610) memberi sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan masalah yang dituju.

6. Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2006:615), berdasar waktu pelaksanaannya, evaluasi kebijakan dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Evaluasi sebelum dilaksanakan (evaluasi summative),
- b. Evaluasi pada saat dilaksanakan (evaluasi proses), dan
- c. Evaluasi setelah kebijakan {evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan atau evaluasi impak/pengaruh (outcome) kebijakan}.

Pada prinsipnya tipe evaluasi kebijakan sangat bervariasi tergantung dari tujuan dan level yang akan dicapai. Dari segi waktu, evaluasi dibagi menjadi dua yaitu evaluasi preventif kebijakan dan evaluasi

sumatif kebijakan. Penelitian ini evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi proses. Hal ini dikarenakan kebijakan penanganan pengungsi erupsi Gunung Sinabung terkhusus relokasi penduduk di Desa Siosar Kecamatan Desa Mereka Kabupaten Karo sedang dalam proses pelaksanaannya dan baru selesai dalam proses tahap pertama.

C. Konsep Penanggulangan Bencana

1. Pengertian Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah

“peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis”.

Menurut *Asian Disaster Reduction Center* (Wijayanto, 2012: 24),

bencana adalah

“suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada”.

Menurut Parker (Wijayanto, 2012: 26), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

2. Konsep Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana seperti yang didefinisikan Agus Rahmat (Purnomo, 2010: 93), merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana. Menurutnya, tujuan kegiatan ini adalah untuk mencegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, dan mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) tentang penanggulangan bencana, bencana dikelompokkan kedalam tiga (3) kategori, yaitu:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

3. Sistem Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mengamanatkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana (*Disaster Manangement Paln*). Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang dibangun berdasarkan undang-undang terdiri dari lima (5) sub sistem, yaitu :

a. Legitimasi

Legitimasi berkaitan dengan peraturan perundang - undangan dari tingkat nasional sampai dengan daerah, bahkan hingga tingkat masyarakat/komunitas. Arti penting legitimasi antara lain :

- 1) Menyusun rencana, membentuk kelembagaan, melakukan tindakan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan lain-lain.
- 2) Menempatkan tanggungjawab secara formal sehingga mempermudah dalam pelaksanaan tanggungjawab dan memberikan perlindungan dari negara/rakyat dari bencana.
- 3) Meningkatkan peran aktif bagi individu dan organisasi/lembaga dalam penanggulangan bencana.
- 4) Melakukan tindakan yang diperlukan bagi individu atau organisasi/lembaga yang terkena dampak bencana.

b. Kelembagaaan

Lembaga bencana dibentuk secara permanen ditingkat pusat dan daerah yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan

tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal terkait hubungan dengan lembaga lain yang bersifat koordinasi yang dilakukan pada fase prabencana dan pasca bencana. Sedangkan hubungan secara vertikal bersifat komando di tingkat pusat. Termasuk penerapan *Incident Command System (ICS)* dilokasi bencana yang dilaksanakan pada situasi darurat bencana.

c. Perencanaan

Perencanaan terkait dengan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan (nasional dan daerah) dan rencana aksi (nasional/daerah) dalam pengurangan resiko bencana. Perencanaan ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah (sesuai wewenangnya), yang penyusunannya dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD. Hal tersebut dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program/kegiatan penanggulangan bencana. Rencana tersebut ditinjau secara berkala oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

d. Pendanaan

Pendanaan penanggulangan bencana berkaitan dengan penyediaan dan pengaturan dana untuk penanggulangan bencana, berupa :

- 1) Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), (APBN/APBD) untuk mendukung kegiatan rutin dan

operasional lembaga terutama untuk kegiatan pengurangan resiko bencana.

- 2) Dana Kontinjensi yang digunakan untuk penanganan kesiapsiagaan (sedang diperjuangkan agar penggunaannya didukung dengan kemudahan akses)
- 3) Dana Siap Pakai untuk bantuan kemanusiaan (*relief*) pada saat terjadi bencana atau pada saat dinyatakan kondisi darurat.
- 4) Dana pemulihan pasca bencana dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di daerah.
- 5) Bantuan masyarakat, bisa berasal dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan bantuan dari dunia usaha/sector swasta sebagai wujud tanggungjawab sosial, yang didalamnya termasuk untuk penanggulangan bencana.

e. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas berkaitan dengan program/kegiatan meningkatkan/membangun kapasitas bangsa/masyarakat yang memiliki kapasitas untuk tangguh menghadapi ancaman bencana. Sasaran akhirnya adalah masyarakat harus mampu mengantisipasi, siap siaga menghadapi bencana, mampu menangani kedaruratan (minimal mampu menolong diri sendiri/keluarga) dan mampu bangkit kembali dari dampak bencana. Banyak program/kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain :

- 1) Sosialisasi penanggulangan bencana melalui media massa;

- 2) Pelatihan manajemen bencana (pencegahan, penanganan dan pemulihan);
- 3) Kepedulian terhadap cara-cara mitigasi yang dapat diterapkan dan keikutsertaan masyarakat dalam program kesiapan/kesiapsiagaan menghadapi bencana;

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (13) tentang Penanggulangan Bencana, Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Sedangkan pada ayat (14), kerentanan terhadap dampak atau resiko/rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Menurut Benson dan Clay (Supriyatna, 2011: 34), dampak bencana dibagi 3 (tiga) antara lain :

1. Dampak Langsung, meliputi kerugian finansial dari kerusakan aset ekonomi, misalnya rusaknya bangunan seperti tempat tinggal dan tempat usaha, infrastruktur, lahan pertanian dan sebagainya.
2. Dampak tidak langsung, meliputi berhentinya proses produksi, hilangnya output dan sumber penerimaan.
3. Dampak sekunder atau dampak lanjutan (*secondary impact*). Contoh: Terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya

rencana pembangunan yang telah disusun, meningkatnya defisit neraca pembayaran, meningkatnya angka kemiskinan dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi:

- a. pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memadai;
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk Dana Siap Pakai (DSP); dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari dampak dan ancaman bencana.

Adapun pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan wewenangnya, meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan kebijakan pembangunan nasional;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
- d. penentuan kebijakan kerjasama dan penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan atau pihakpihak internasional lain;
- e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurangan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan, dan
- g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

4. Upaya Penanganan Bencana

Menurut Nurjanna, dkk (2010: 56), upaya-upaya penanggulangan bencana, yaitu :

1. Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam.
2. Menempatkan korban di suatu tempat yang aman
Menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak dibutuhkan. Sesuai dengan deklarasi Hyogo yang ditetapkan pada Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana, di Kobe, Jepang, pertengahan Januari 2005 yang lalu, menyatakan bahwa “Negara-negara mempunyai tanggungjawab utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayah kewenangan dari ancaman dengan memberikan prioritas yang tinggi kepada pengurangan resiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia kepada Masyarakat”, seperti:
 - a. Membentuk Tim Penanggulangan Bencana.
 - b. Memberikan penyuluhan-penyuluhan.
 - c. Merelokasi korban secara bertahap.

Pada bencana erupsi Gunung Sinabung pemerintah melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana. Kebijakan relokasi korban erupsi Gunung Sinabung merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud upaya penanggulangan bencana untuk mengatasi masalah bencana alam.

D. Konsep Relokasi

1. Pengertian Relokasi

Secara harafiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:97) relokasi diartikan sebagai pemindahan tempat atau pemindahan dari suatu lokasi ke lokasi lain. Jika dikaitkan dalam konteks perumahan dan pemukiman relokasi dapat diartikan pemindahan suatu lokasi pemukiman ke lokasi pemukiman yang baru.

Menurut Yudohusodo (1991: 34) relokasi dilakukan terhadap pemukiman yang tidak diperuntukkan bagi perumahan atau lokasi pemukiman yang rawan terhadap bencana atau bahkan yang terkena bencana. Relokasi merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh, status lahannya tidak legal (*ilegal*) yang bermukim di lingkungan rawan bencana untuk menata kembali kehidupan di tempat yang baru.

Pada penelitian ini, yang dimaksud dalam konsep relokasi adalah salah satu wujud nyata yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana di daerah tertentu. Menurut Nurjanna, dkk (2010: 56) relokasi merupakan salah satu upaya pemerintah atau kelompok lain dalam penanggulangan bencana yang dialami oleh masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.

2. Prosedur Pelaksanaan Relokasi

Ridho (2001: 69) mengemukakan bahwa prosedur yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan relokasi yaitu:

1. Pendekatan yang interaktif kepada masyarakat yang terkena relokasi dalam rangka menginformasikan rencana program relokasi tersebut;
2. Pembentukan forum diskusi warga sebagai wadah untuk menggali respon, aspirasi warga dan peran serta masyarakat dalam proyek perencanaan. Kegiatan forum ini dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga terlaksananya program;
3. Penyusunan rencana penempatan lokasi rumah tempat tinggal warga dengan memperhatikan aspirasi warga;
4. Setelah pemindahan warga ke lokasi baru perlu diadakan bimbingan dan pembinaan terhadap warga agar dapat menyesuaikan diri di tempat baru.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah konsep yang terjadi antara hubungan sebab akibat atau kausal hipotesa antar variabel bebas dan variabel terikat atau tidak bebas dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diselidiki (Sukardi, 2005; 92).

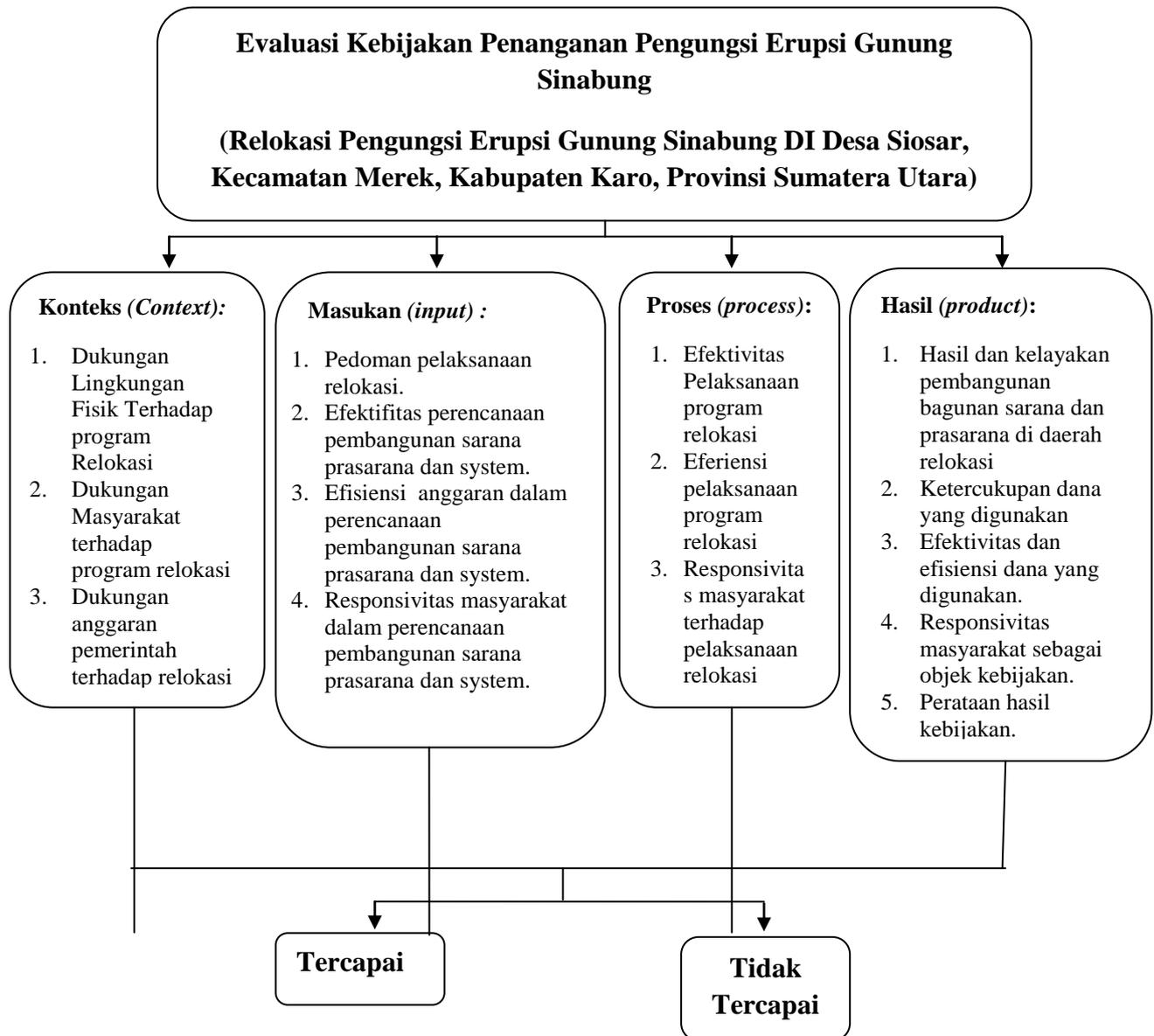
Dalam rangka mewujudkan organisasi berkinerja tinggi, langkah akhir dalam proses yang harus dilakukan adalah tahap evaluasi terhadap kinerja organisasi. Menurut Chaizi Nasucha (Irham, 2013;3), kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha - usaha yang sistemik dan meningkatkan

kemampuan organisasi secara terus menerus guna mencapai kebutuhannya secara efektif. Dengan demikian kinerja mempunyai peran yang besar dalam menjalankan sebuah organisasi dan perlu dilakukan suatu evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dengan standar prosedur yang jelas.

Evaluasi kebijakan relokasi pengungsi Gunung Sinabung di Desa Siosar di Kabupaten Karo Sumatera Utara ditandai dengan ketercapaian tujuan dari kebijakan sebagai acuannya adalah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Terdampak Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Evaluasi ini dianalisis dengan pendekatan evaluasi formal. Penelitian ini membahas pelaksanaan dan hasil kinerja kebijakan dengan menggunakan tipe evaluasi proses yaitu evaluasi yang dianalisis berdasarkan proses dari kebijakan itu sendiri.

Kebijakan yang dievaluasi adalah implementasi kebijakan relokasi pengungsi di Desa Siosar Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang diuji ketercapaiannya berdasarkan Model evaluasi CIPP indikator penilaiannya yang dikemukakan dalam teori Dunn (2006: 610) yaitu efektifitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, reponsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan kelima indikator ini akan ditentukan apakah kebijakan tersebut tercapai atau tidak.

Kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat seperti dalam skema kerangka pikir dibawah :



Gambar. 1 : Skema Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menangani korban pengungsi erupsi Gunung Sinabung, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Menurut David Williams (dalam Moleong, 2011:5) penelitian kualitatif adalah pengumpulan kata dalam suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Adapun alasan penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif melalui metode kualitatif yaitu memberikan gambaran dan mendeskripsikan tentang masalah yang diteliti terkait bagaimana evaluasi kebijakan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung terutama relokasi di Desa Siosar Kecamatan Merek Kabupaten Karo Sumatera Utara. Peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena penelitian kualitatif biasa digunakan untuk meneliti informasi secara mendalam dalam konteks evaluasi suatu kebijakan dan tindakan suatu lembaga dalam upaya mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai kebijakan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung.

Peneliti menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku orang yang diamati, yang kemudian data tersebut yang diperoleh di lapangan dikumpulkan dalam bentuk data-data seperti kata/perilaku dan kalimat, dengan latar belakang alamiah yang mana manusia merupakan instrumen. Kemudian data-data tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan fenomena sosial yang diteliti. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

B. Fokus Penelitian

Hasil kegiatan pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif adalah fokus penelitian. Pertimbangan mengapa perlu ada fokus masalah penelitian setidaknya ada dua hal yang dapat disebutkan, yaitu pembatasan kajian dan pemenuhan kriteria inklusif. Menurut Moleong (2006: 92) fokus penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan penelitian. Fokus penelitian ini harus konsisten dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diterapkan terlebih dahulu.

Pelaksanaan kebijakan relokasi pengungsi erupsi gunung sinabung, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara beracuan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas

Percepatan Relokasi Terdampak Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Fokus penelitian dalam penelitian ini terbatas untuk mengevaluasi bagaimana ketercapaian dari hasil kebijakan relokasi di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang meliputi:

1. Pembangunan area hunian tetap di area lokasi;
2. Pembangunan sarana dan prasarana di area relokasi, yang terdiri dari:
 - a) Sarana ibadah;
 - b) Sarana pendidikan;
 - c) Sarana kesehatan;
 - d) Sarana pemerintahan;
 - e) Sarana jalan dan transportasi, dan;
 - f) Sarana lain yang diperlukan;
3. Menyediakan lahan pertanian.

Hasil kebijakan dianalisis dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) berkaitan dengan empat indikator yang menjadi sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari sebuah program kebijakan. Melalui evaluasi hasil dari sebuah kebijakan yang dilaksanakan pemerintah untuk menangani pengungsi korban Gunung Sinabung, terdapat Model lima indikator ketercapaian dari kebijakan relokasi pengungsi erupsi gunung sinabung di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kelima indikator tersebut adalah :

1. Efektifitas yaitu apakah hasil dari tujuan yang diinginkan telah tercapai

2. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Perataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda
4. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah
5. Responsifitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu
6. Ketepatan yaitu apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Melalui kelima indikator tersebut maka akan terlihat bagaimana ketercapaian kebijakan relokasi pengungsi Gunung Sinabung di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

C. Kriteria Evaluasi

Pada evaluasi ini, pendekatan kriteria yang digunakan adalah pendekatan dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk melakukan suatu penelitian tentang evaluasi pelaksanaan program relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Desa Siosar, Kecamatan Desa Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara diantaranya sebagai berikut.

Tabel 5. Kriteria Evaluasi

No (1)	Kriteria Evaluasi (2)	Indikator (3)	Metode (4)
1.	Konteks (<i>context</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan lingkungan fisik terhadap program relokasi; 2. Dukungan masyarakat terhadap program relokasi; 3. Dukungan anggaran pemerintah terhadap program relokasi; 	Wawancara Observasi Dokumentasi
2.	Masukan (<i>input</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pelaksanaan relokasi. 2. Ketersediaan lahan relokasi. 3. Efektifitas perencanaan pembangunan sarana prasarana dan system. 4. Efisiensi anggaran dalam perencanaan pembangunan sarana prasarana dan system. 5. Responsivitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan sarana prasarana dan system. 6. Perataan perencanaan pembangunan sarana prasarana dan system kepada masyarakat. 	Wawancara Observasi Dokumentasi
3.	Proses (<i>process</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas Pelaksanaan program relokasi 2. Efisiensi pelaksanaan program relokasi 3. Responsivitas masyarakat terhadap kinerja pelaksanaan relokasi 	Wawancara Observasi Dokumentasi
4.	Hasil (<i>product</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil dan kelayakan pembangunan bangunan sarana dan prasarana di daerah relokasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan perumahan untuk ketiga desa yang direlokasi; b. Pembangunan sarana pendidikan; c. Pembangunan sarana kesehatan; d. Pembangunan rumah ibadah. e. Pengadaan sarana transportasi; f. Pembangunan sarana pemerintahan (kantor desa/balai desa); g. Pengadaan lahan pertanian 2. Ketercukupan dana yang digunakan. 3. Efektivitas dan efisiensi dana yang digunakan. 4. Responsivitas masyarakat sebagai objek kebijakan. 5. Perataan hasil kebijakan. 	Wawancara Observasi Dokumentasi

D. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi, Moleong (2004: 86) menyatakan cara terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substansi dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan. Sementara itu keterbatasan geografis, waktu, biaya, dan tenaga perlu dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada penelitian ini bertempat di Desa Siosar, Kecamatan Desa Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena Desa Siosar merupakan tempat relokasi korban pengungsi erupsi Gunung Sinabung dan yang merupakan bukti fisik dari kebijakan relokasi tersebut.

E. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013: 2) kriteria dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar yang terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna balik yang terlihat dan terucap tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Lofland dalam (Moleong, 2006: 157) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Penelitian ini, data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara sumber atau informan yang berpotensi dalam memberikan

informasi yang relevan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Serta tambahan pendukung data yang didapatkan melalui media massa, data tersebut berupa pernyataan-pernyataan mengenai kebijakan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung.

Teknik yang digunakan informan adalah teknik *purposive sampling* yaitu teknik informan berdasarkan pertimbangan. Pemilihan informan didasarkan atas subjek yang memahami permasalahan dan bersedia memberi data ataupun informasi lain yang dapat dijadikan jawaban dari penelitian yang diperlukan. Penelitian kualitatif merupakan sumber data yang didapatkan dari narasumber yang sangatlah penting untuk keberlangsungan penelitian ini, di mana individu yang mempunyai informasi dapat membantu dalam permasalahan internal terkait dengan kebijakan penanganan pengungsi erupsi Gunung Sinabung.

2. Data Sekunder

Lofland (Moleong 2006: 157) data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dapat berupa studi pustaka yang berasal dari buku-buku, penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Berbagai dokumen dihasilkan melalui objek penelitian yang dipergunakan untuk

mendukung data primer dan memperkuat data dalam melakukan penelitian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, catatan-catatan, profil, arsip resmi dan data-data tertulis lainnya yang didapatkan oleh peneliti dari kantor BPBD Kabupaten Karo Sumatera Utara dan Satuan Percepatan Korban Bencana Terdampak Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo

F. Penentuan Informan

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dipilih atas dasar pertimbangan informan yang mengalami langsung situasi dan proses pelaksanaan kebijakan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di desa siosar kecamatan merek, kabupaten karo, Sumatera utara.

Tabel 6. Informan penelitian

Nama	Umur	Jenis kelamin	Jabatan
Drs. Jhonson Tarigan	46 tahun	Laki-laki	Sekretaris BPBD Kabupaten Karo
Dr.Sabrina Br Tarigan	45 tahun	Perempuan	Sekretaris daerah kabupaten karo
Juri Ginting	42 tahun	Laki-laki	Masyarakat desa suka meriah
Selvi Alpionika Br Surbakti	23 tahun	Perempuam	Masyarakat desa bakerah
Kasim Sitepu	56 tahun	Laki-laki	Masyarakat desa simacem

G. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013: 63) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

Teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan informan, selain itu dokumentasi bertujuan agar diperoleh informasi secara baku/tertulis. Hasil dokumentasi akan dicocokkan dengan hasil wawancara sehingga didapatkan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Moleong (2006: 173) observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan secara langsung di lapangan atau di lokasi. Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati perkembangan sejauh mana kinerja dan ketercapaian tujuan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung terkhusus tentang relokasi ke Desa Siosar Kabupaten Karo Sumatera Utara. Menurut Marshall (Sugiyono,

2013: 64) melalui observasi belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi terus terang atau tersamar untuk menghindari suatu data yang dicari merupakan data yang masih rahasia sehingga kemungkinan jika dilakukan terus terang, maka penelitian tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.

Adapun pelaksanaan observasi dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Peneliti terlebih dahulu menentukan aspek-aspek tingkah laku apa yang akan diobservasi, kemudian dibuat sebagai acuan untuk penelitian agar mempermudah saat observasi.

b. Tahap Pelaksanaan.

Pada tahap ini peneliti mendatangi sumber informan yang terkait untuk dimintai informasinya yang sesuai dengan topik permasalahan yang memiliki hubungan terkait yang akan diteliti. Kemudian peneliti dapat melihat bagaimana fenomena atau kejadian permasalahan yang akan diteliti tersebut.

2. Teknik Wawancara

Esterberg (Sugiyono, 2013:72) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan dukungan alat

bantu untuk seperti buku untuk mencatat informasi yang dibutuhkan serta kamera untuk bukti konkrit jika memang benar melakukan wawancara dengan pihak yang memahami permasalahan.

a. Wawancara Terstruktur (*Structured interview*)

Wawancara terstruktur digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya sudah disiapkan.

b. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber informasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mempermudah pelaksanaan wawancara.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2013: 82), dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian yang merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu dokumentasi dapat berupa tulisan ataupun berita media *online*, arsip-arsip tertulis dari kantor BNPD Kabupaten Karo ataupun dokumentasi eksternal berisi

bahan-bahan informasi berupa buku, jurnal ilmiah, data internet berkaitan yang membantu penelitian.

H. Teknik Pengolahan Data

Moleong (2006: 151) setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap selanjutnya adalah mengolah data. Adapun teknik yang digunakan dalam mengolah data diantaranya:

1. Pengumpulan data, dalam tahap meneliti pengumpulan data merupakan faktor penting, penelitian tersebut menghasilkan sumber yang berupa data primer atau sekunder yang diperoleh melalui panduan wawancara, dokumentasi dan bukti berupa data.
2. Editing Data, data yang diperoleh kemudian diteliti kembali, agar dapat diketahui kelengkapan data, kejelasan data, kesesuaian data jawaban dan keseragaman satuan data.
3. Sistematisasi Data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.
4. Interpretasi Data, Interpretasi yang dilakukan mendeskripsikan masalah penelitian yang diteliti yang berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah kemudian dilakukan penarikan kesimpulan, untuk kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menjabarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian.

I. Teknik Analisis Data

Menurut Noor (2011: 163) analisis data adalah teknik yang dilakukan setelah data yang diperoleh dari informan atau sumber data lain terkumpul. Selain itu, analisis data dapat dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Hal ini memang sebenarnya teknik analisis data pada umumnya menuntut uji persyaratan analisis. Cara menganalisis data penelitian termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.

Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk menganalisis data dengan memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai menjawab atas permasalahan yang diteliti.

Menurut Sugiono (2013: 88), teknik analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan sumber dari lapangan terkait fokus permasalahan. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu reduksi data, menampilkan data, verifikasi data dan kesimpulan. Pada tahap reduksi data peneliti memilih dan menyusun data, memindahkan data kasar ke catatan lapangan.

Pada tahap kedua, peneliti menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang memiliki makna. Pada tahap verifikasi data peneliti berusaha menggambarkan atau menjelaskan untuk kebenaran data. Pada

tahap kesimpulan peneliti menghubungkan dan membandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang ada, memiliki makna yang mengorganisasikan data, memilih, menjabarkan, menyusun dan membuat kesimpulan.

J. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) atas keandalan (*realibilitas*). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data.

Menurut Moleong (2011; 324) ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu;

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Penerapan kriteria derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi: Pertama, melaksanakan instruksi sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kriteria

derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

a. Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain melalui berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan cara:

- 1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- 2) mengeceknya dengan berbagai sumber data;
- 3) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni dari masyarakat yang berada di wilayah relokasi Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera utara.

b. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

2. Keteralihan

Kriterium keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi.

3. Ketergantungan

Ketergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *dependable*.

4. Kepastian (*confirmability*)

Penelitian kalitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif tapi sudah objektif.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Umum Kabupaten Karo

1. Geografis

Kabupaten Karo terletak diantara 2°50” - 3°19” Lintang Utara serta pada 97°55 - 98°38” Bujur Timur merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di kawasan Palung Pasifik Barat dengan luas wilayah 2.127,25 Km² atau merupakan 2,97% dari luas Propinsi Sumatera Utara. Secara administratif terdiri dari 17 Kecamatan dan 262 Desa/Kelurahan (252 desa dan 10 kelurahan), dengan jumlah penduduk 2.127,25 jiwa (Karo Dalam Angka 2009).

Tabel 7. Karakteristik Geografis Kabupaten Karo

KARAKTERISTIK	PENJELASAN
Letak	2°50 - 3°19 Lintang Utara 97°55” - 98°38” Bujur Timur
Luas Wilayah	2.127,25 Km ²
Letak diatas permukaan Laut	120-1420 M
Batas-Batas	Utara : Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deliserdang Selatan : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Samosir Barat : Propinsi Nangroe Aceh Darusalam Timur : Kabupaten Deliserdang dan Kaabupaten Simalungun
Daerah Administratif	terdiri dari 17 Kecamatan dan 262 Desa/Kelurahan

Sumber : Arsip Pemerintahan Kabupaten Karo, Tahun 2016.

2. Topografis

Kabupaten Karo secara topografis terletak pada jajaran bukit barisan dan sebagian besar merupakan dataran tinggi. Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini. Wilayah kabupaten karo berada 120-1420 diatas permukaan laut.

3. Hidrologi

Kabupaten Karo merupakan Daerah Hulu Sungai (DHS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu/Ular, sub Daerah Aliran Sungai Laubiang, dengan luas areal 2.127,25 km², yang kesemuanya bermuara ke Selat Malaka. Pada umumnya sub DAS ini dimanfaatkan untuk mengairi areal persawahan sebagai upaya peningkatan produksi pertanian.

4. Administratif

Secara administratif wilayah Kabupaten Karo terbagi dalam wilayah 17 kecamatan, 252 desa dan 10 kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Karo berada di kabanjahe.

a. Luas Wilayah Jenis Tanah dan Penggunaan Lahan

Wilayah Kabupaten Karo terdiri dari 17 Kecamatan dan 262 desa/kelurahan memiliki luas wilayah 2.127, 25 km² dengan luas wilayah masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :

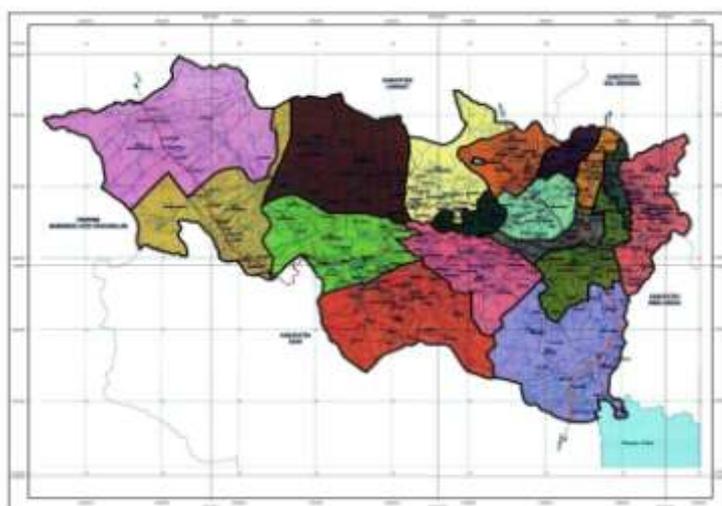
Tabel 8. Luas Wilayah Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
(1)	(2)	(3)
1	Mardingding	267,11
2	Laubaleng	252,60
3	Tigabinanga	160,38
4	Juhar	218,56
5	Munte	125,64
6	Kutabuluh	195,70
7	Payung	47,24
8	Tiganderket	86,76
9	Simpang empat	93,48
10	Naman Teran	87,82
11	Merdeka	44,17
12	Kabanjahe	44,65
13	Berastagi	30,50
14	Tigapanah	186,84
15	Dolat Rayat	32,25
16	Merek	125,51
17	Barusjahe	128,04
	Jumlah	2.127,25

Sumber : Kab. Karo Dalam Angka Tahun 2010

Untuk pembagian wilayah kabupaten karo dapat dilihat di gambar Peta Kabupaten

Karo berikut ini :



Gambar 2 : Peta Kabupaten Karo

Secara rinci, penggunaan lahan di Kabupaten Karo dapat dibedakan sebagai berikut :

Tabel 9. Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Karo Tahun 2003 - 2013

No (1)	Penggunaan Lahan (2)	Luas (Ha) (3)	Luas Persentase (4)
1	Hutan Lindung	96.387	45,31
2	Suaka Alam	475	0,22
3	Taman Nasional	0	0,00
4	Hutan Wisata	0	0,00
5	Tahura	7	0,003
6	Hutan Produksi	22.987	10,81
7	Tanaman Lahan Basah	16.454	7,73
8	Tanaman Lahan Kering	46.448	21,83
9	Tanaman Tahunan	14.138	6,65
10	Perkebunan Campuran	7.714	3,63
11	Alang-Alang	8.115	3,81
	Jumlah	212.725	100

Sumber : Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo 2003 – 2013.

5. Tata Ruang Wilayah Kabupaten karo

Setiap wilayah yang ada di Kabupaten Karo memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya binaan dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Dalam rangka mengurangi kesenjangan perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai dengan potensi, hambatan, dan tantangannya dalam bentuk suatu rencana struktur yang mempunyai hirarki keruangan. Rencana struktur yang dikembangkan tersebut akan mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya. Apabila sistem pemenuhan kebutuhan terjadi dalam jangka panjang berarti sistem perekonomian wilayah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan

perkembangan ekonomi dapat terwujud. Sistem perkotaan di Kabupaten Karo antara lain meliputi:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pada dasarnya Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan usulan pemerintah Kabupaten Karo, setelah dikonsultasikan dengan Menteri. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan kriteria :

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Berdasarkan arahan Rencana Sistem Perkotaan dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara dan arahan Rencana Sistem Pusat Kegiatan dari Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro, maka Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan di Kabupaten Karo adalah PKL yang sudah ditetapkan oleh RTRWP Sumatera Utara. Sedangkan Pusat Kegiatan Sekunder yang diarahkan oleh RTR Kawasan Perkotaan Mebidangro yang tidak termasuk dalam PKL akan ditetapkan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Dengan demikian maka Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terdapat di Kabupaten Karo, adalah :

- 1) Kabanjahe, dengan fungsi utama sebagai : • Pusat pemerintahan kabupaten;

- 2) Berastagi, dengan fungsi utama sebagai : • Perdagangan dan jasa regional (pasar induk dan terminal sayur); • Pariwisata; • Perumahan dan permukiman.

b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Karo ditetapkan berdasarkan pertimbangan Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro dan potensi pengembangan Kabupaten Karo, dengan kriteria dan pertimbangan sebagai berikut;

1. Peluang pengembangan Kabupaten Karo sebagai kawasan metropolitan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Mebidang-Ro (Medan-Binjai-Kabupaten Deli Serdang-Karo).
2. Peluang pengembangan potensi pertanian, perhotelan, restoran dan pariwisata di Kabupaten Karo.
3. Ketersediaan jaringan jalan di Kabupaten Karo yang menghubungkan dengan wilayah luarnya.

c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan kecamatan,

pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pusat Pelayanan Lingkungan yang ditetapkan adalah kota-kota kecamatan diluar PKL dan PPK yang ditentukan berdasarkan fungsi dan potensi masing-masing desa dan kecamatan.

Fungsi utama yang dikembangkan pada Pusat Pelayanan Lingkungan tersebut diantaranya, adalah:

- Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
- Pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
- Pusat distribusi dan koleksi hasil pertanian dan perkebunan;
- Pusat pelayanan sosial tingkat kecamatan;
- Permukiman perdesaan;

Berdasarkan uraian diatas maka secara hirarki perkotaan nasional, pusat pelayanan utama yang ada di Kabupaten Karo adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat perkotaan Hirarki I, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan Hirarki II serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang ditetapkan adalah pusat-pusat kota kecamatan yang ditentukan berdasarkan fungsi dan potensi masing-masing kecamatan sebagai hirarki III.

B. Institusi Dan Organisasi Pemerintah Kabupaten Karo

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja. Secara lengkap peraturan daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Karo. Berdasarkan

peraturan daerah tersebut, Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Karo terdiri dari :



Gambar 3. Struktur Institusi dan Organisasi Pemerintah Kabupaten karo

C. Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menangani bencana. Bukan hanya itu, BPBD Kabupaten Karo masih membutuhkan pegawai harian lepas (Tim Reaksi Cepat) yang tugasnya untuk bergerak di lapangan apabila ada bencana. Sehingga apabila bencana terjadi dapat secara cepat dalam menanggulangi bencana tersebut.

1. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Karo

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo memiliki visi “Mewujudkan Ketangguahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Karo dalam Menghadapi Bencana”

Dan untuk membantu pencapaian visi, ada beberapa misi yang telah ditetapkan bersama, yaitu :

1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana;
2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana;
3. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
4. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana;
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor dalam pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
6. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur serta kualitas dan kuantitas peralatan penanggulangan bencana;
7. Membangun jaringan informasi, komunikasi, dan koordinasi penanggulangan bencana;
8. Meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran masyarakat untuk tanggap bencana;
9. Meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana;

10. Melindungi masyarakat Kabupaten Karo dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.

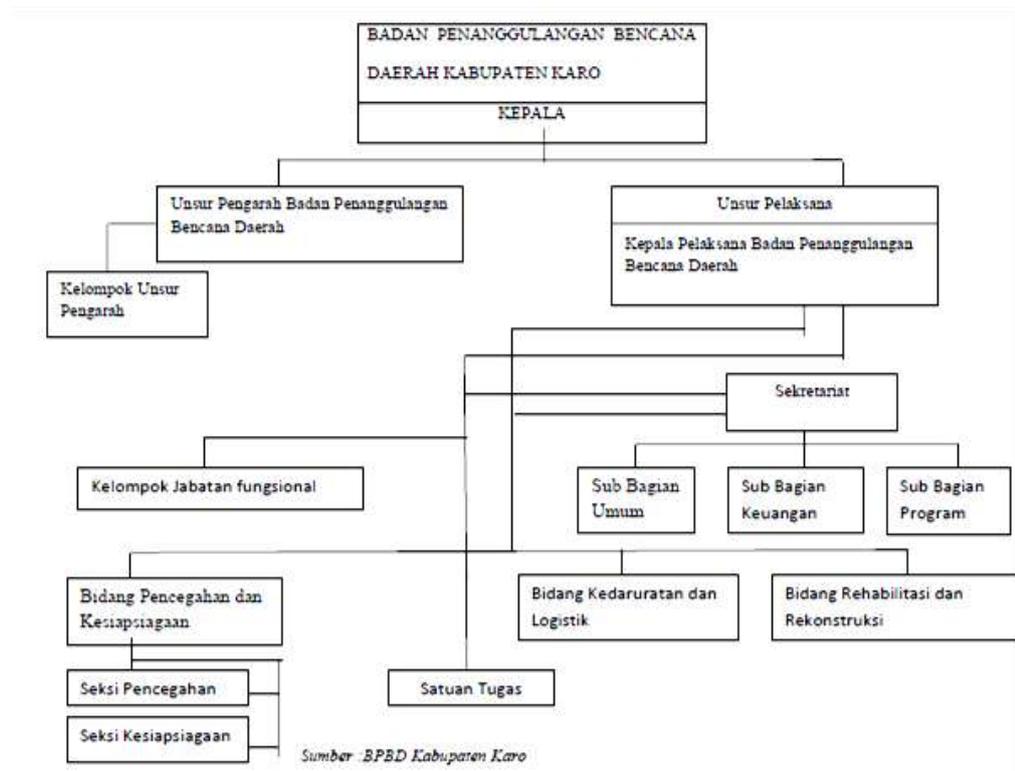
Tabel 10. Data Jumlah SDM BPBD Kabupaten Karo

No (1)	Nama (2)	NIP (3)	Gol (4)	Jabatan (5)
1	Ir. Subur Tambun	196112141989101002	IV/c	Kepala Pelaksana
2	Drs. Jhonson Tarigan	196405191993031004	IV/a	Sekretaris
3	Ruslely Br.Sitepu	196512311994032028	III/c	Kasubbag Umum
4	Seriawani Br.Ginting,SH	196503231986022002	III/d	Kasubbag Keuangan
5	Rusli Pinta Ulina Habeahan,A.Md	197904202011012004	II/c	Staf Sekretariat
6	Berta Br. Surbakti,A.Md	198102212010012018	II/d	Staf Sekretariat
7	Winda Ansari Br.Ginting,A.Md	198506092010012034	II/d	Staf Sekretariat
8	Phoppy Maria Br. Simarmata,SE	-	-	Staf Sekretariat(Honorer)
9	M.Rizky	-	-	Staf Sekretariat(Honorer)
10	Bintang Surbakti	-	-	Staf Sekretariat(Honorer)
11	A .Rachman Putra Brahmana	-	-	Staf Sekretariat(Honorer)
12	Netta Siregar	-	-	Staf Sekretariat(Honorer)
13	Jefri Cornelius Sebayang	-	-	Staf Sekretariat(Honorer)
14	Susilawati	-	-	Staf Sekretariat(Honorer)
15	Ardiansyah	-	-	Staf Sekretariat(Honorer)
16	Rinto Ginting, SH	198103022005021001	III/c	Kabid.Kedaruratan dan Logistik
17	Riwanda Ketaren,SH	197709091998031002	III/c	Kasi Kedaruratan
18	Damayanti Siregar,ST,M.I.L	198107132008032001	III/c	Kasi Logistik
19	Beratayuda Perangin-angin A.Md	198311032008051001	II/d	Staf.Bid.Kedaruratan dan Logistik
20	Victor Suranta Ginting	197909022009011006	II/b	Staf.Bid.Kedaruratan dan Logistik
21	Amri Purba	198308052009011007	II/b	Staf.Bid.Kedaruratan dan Logistik
22	Reinhard Ojahan Lingga	-	-	Staf.Bid.Kedaruratan dan Logistik(Honorer)
23	Haris Rinaldy	-	-	Staf.Bid.Kedaruratan

	Sinulingga,SE			dan Logistik(Honorer
24	Suharta Sembiring,ST	197109062005021001	III/c	Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
25	Lely Junita Br.Ginting,ST	197806042009032005	III/c	Kasi.Rekonstruksi
26	Sarman Tarigan,ST	197604112002121004	III/d	Staf.Bid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
27	Ebenneser Suranta Sitepu,ST	198210202011011011	III/a	Staf.Bid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
28	Meili Nita Meliala S.Psi	-	-	Staf.Bid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi(Honorer)
29	Sempurna Singarimbun	-	III/b	Kasi. Kesiapsiagaan
30	Samsin Tarigan,SP	-	III/a	Staf. Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
31	Markus	-	II/b	Staf. Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
32	Herison Ginting,SH	-	III/a	Staf. Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
33	Rani Aurora Barus	-	-	Staf. Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan(Honorer)
34	Jhon Kristo Sembiring Kembaren	-	-	TRC (Tim Reaksi Cepat)
35	Bram Jeremia Brahmana			TRC (Tim Reaksi Cepat)
36	Leymart Leonardo Surbakti			TRC (Tim Reaksi Cepat)
37	Florida Br. Pinem S.sos			TRC (Tim Reaksi Cepat)
38	Gedli Rhamadana S Kembaren			TRC (Tim Reaksi Cepat)
39	Niconta Purba			TRC (Tim Reaksi Cepat)
40	Danni Purba			TRC (Tim Reaksi Cepat)
41	Welkandris Sembiring			TRC (Tim Reaksi Cepat)
42	Destanael Firdaus Sinuraya,SH			TRC (Tim Reaksi Cepat)
43	Victor Francius Sitepu			TRC (Tim Reaksi Cepat)

Sumber :BPBD Kabupaten Karo 2016

2. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Karo



Gambar 4. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Karo

3. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Karo

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo mempunyai tugas:

Dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan, peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pasca dan pra bencana.
1. Tugas Kepala Pelaksana

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- b. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok baik kesekretariatan, maupun urusan pemerintah yang meliputi Penetapan Kebijakan dan Standar Penanggulangan Bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- c. Menetapkan, melaksanakan visi dan misi Badan untuk mendukung visi dan misi daerah
- d. Menyusun, dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Badan sesuai dengan visi dan misi daerah;
- e. Merumuskan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana.;
- f. Merumuskan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Merumuskan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. Merumuskan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- i. Merumuskan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
- j. Melaksanakan koordinas/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penanggulangan bencana;

- k. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah;
 - l. Memberikan saran,pertimbangan dan pendapat kepada Kepala Badan dalam rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo;
 - m. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait yang ada di daerah, Proinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok;
 - n. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Badan termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Badan kepada Bupati melalui Kepala Badan.
2. Tugas Sekretaris Daerah
- a. Memimpin,mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan program pengelolaan umum,kepegawaian,pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - c. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;

- d. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan;
- e. Merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan

Tugas Sub Bagian Umum;

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan kerumahtanggaan;
- b. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan kerumahtanggaan;
- d. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- e. Melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat Tugas Sub Bagian Keuangan.

Tugas Sub Bagian Program

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;

- c. Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran dan pembiayaan Badan;
- e. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan

Tugas Sub Bagian program

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan;
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana strategis Badan;
 - d. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan penunjang pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.
3. Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- a. Memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d. Melaksanakan perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- e. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

Tugas Kepala Seksi Pencegahan

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan, pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan pencegahan bencana;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- c. Melaksanakan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana.

Tugas Kepala Seksi Kesiapsiagaan

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan, pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme dan system pencegahan dini kebencanaan;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan kemampuan memobilisasi sumber daya.
4. Tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - c. Merupakan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- d. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- e. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

Tugas Kepala Seksi Kedaruratan

- a. Melaksanakan penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi penanggulangan bencana;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ke tempat yang aman;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana

Tugas Kepala Seksi Logistik

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistic penanggulangan bencana;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana;

- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik;
 - e. Melakukan pelaksanaan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana.
5. Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - e. Melaksanakan perumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik.

Tugas Kepala Seksi Rehabilitasi

- a. Melaksanakan penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana;

- b. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana ;
- e. Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;

Tugas Kepala Seksi Rekonstruksi

- a. Menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana;
- b. Menyusun bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
- c. Menyusun bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
- d. Menyusun bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- e. Menyusun bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam pembangunan daerah.

Tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo tidak akan berjalan dengan baik apabila dikerjakan oleh BPBD Kabupaten Karo itu sendiri. Agar berjalan dengan baik, maka BPBD Kabupaten Karo bekerja sama dengan instansi

pemerintah Kabupaten Karo (dinas-dinas pemerintah Kabupaten Karo) yang memiliki tugas dan fungsi seturut dengan tupoksi BPBD Kabupaten Karo, yaitu upaya penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo. Beberapa instansi pemerintah Kabupaten Karo tersebut bekerja sama memberi bantuan , baik barang maupun jasa, ke wilayah yang membutuhkan dan yang menjadi korban bencana erupsi Gunung Sinabung. Contoh wilayah dalam penelitian ini adalah daerah relokasi di Desa Siosar.

4. Peta Rawan Bencana Gunung Sinabung Kabupaten Karo

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementrian ESDM beberapa tahun lalu membuat peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung api yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari mediacenter.or.id, Gunung Sinabung memiliki KRB yang dibagi dalam tiga ring, yakni :

a. Kawasan Rawan Bencana I (KRB I)

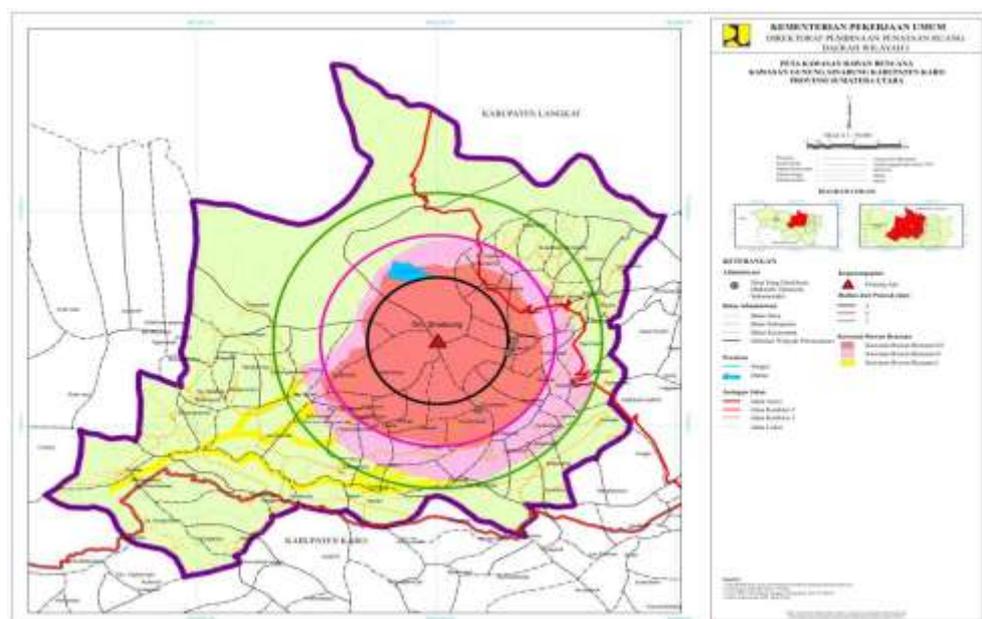
Kawasan ini merupakan kawasan ring terluar yang rawan terhadap dampak letusan Gunung Sinabung yang berada dalam radius 5-7 Km dari puncak gunung yang ditunjukkan oleh kawasan arsiranwarna kuning. Kawasan ini diperkirakan akan berpotensi tertimpa hujan abu dan kemungkinan dapat tertimpa material batu pijar berdiameter lebih kecil dari 2 cm. Beberapa lembah dan sungai yang berada dalam KRB I kemungkinan ditanda lahar hujan dan perluasan awan panas.

b. Kawasan Rawan Bencana II (KRB II)

Kawasan ini merupakan kawasan ring tengah yang berada dalam radius 2-5 Km dari puncak gunung yang ditunjukkan oleh kawasan arsiran warna merah muda. Wilayah ini berpotensi terkena lontaran batu pijar berdiameter antara 2-6 cm, hujan abu lebat, awan panas, aliran lava dan guguran lava-lava, serta gas beracun. Danau Kawar yang berada di gunung api Sinabung masuk dalam area KRB II ini.

c. Kawasan Rawan Bencana III (KRB III)

Kawasan ini merupakan kawasan ring terdalam dan paling berbahaya yang berada dalam radius 0-2 Km dari puncak gunung. Kawasan ini sangat berpotensi tertimpa lontaran batu pijar berdiameter lebih besar dari 6 cm dan hujan abu lebat. Pada lembah-lembah kawasan ini berpotensi dilanda aliran lava, awan panas, guguran lava, dan gas beracun.



Gambar 5. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Sinabung Kabupaten Karo

Dalam pembuatann peta rawan bencana juga diperlukan dana yang cukup besar, di tahun 2014 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Sinabung Kabupaten Karo di buat oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Geologi (PVMBG) dengan dana sebesar Rp.100.000.000. Dana siap pakai tersebut diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (Hasil wawancara dengan Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo, Drs.Jhonson Tarigan pada tanggal 4 Juni 2016).

Berdasarkan penelitian ini maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo yang baru terbntuk kurang lebih satu tahun telah memiliki peta rawan bencana. Dengan adanya peta rawan bencana tersebut, maka masyarakat akan mengetahui bagaimana melakukan pengurangan resiko bencana bila terjadi dan masyarakat juga dapat mengantisipasi bila ada gejala terjadinya erupsi Gunung Sinabung dan dapat mempersiapkan atau menjaga diri masing-masing.

5. Kondisi Umum Pengungsi Gunung Sinabung

Letusan Gunung Sinabung terjadi sejak tahun 2010 sampai sekarang mengakibatkan Masyarakat yang tinggal dikawasan Gunung Sinabung harus mengungsi berikut adalah jumlah pengungsi Gunung Sinabung yang masih berada di penampungan.

Tabel 11. Data Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo

No	Posko Penampungan	Alamat	KK	Jiwa	Lk	Pr	Kelompok Rentan				Asal Pengungsi
							Lansia	Ibu Hamil	Balita	Bayi	
1	Paroki G. Katolik	Kabanjahe Jl. Irian Kabanjahe	297	996	491	505	55	8	71	16	Desa Tiga Pancur
2	Gedung Serba Guna KNPI	Kabanjahe Jl. Pahlawan Kabanjahe	341	1,197	598	599	57	1	126	10	Desa Sukanalu
3	GBKP Ndokum Siroga	Desa Ndokum Siroga	77	273	143	130	38	4	10	18	Desa Pintu Mbesi
4	Gedung Serba Guna GBKP Kabanjahe	Jl. Mariam Ginting Kabanjahe	420	1,516	733	783	88	12	138	22	Desa Sigaranggaring
5	Gudang Jeruk Surbakti	Desa Surbakti	192	670	329	341	46	10	67	14	Desa Jeraya
6	BPPT, Jambur Tongkoh	Tongkoh	577	2,176	1,079	1,097	79	27	176	76	Desa Kuta Rayat
7	Jambur Korpri	Jl. Djamin Ginting Berastagi	265	1,040	519	521	29	95	7	19	Desa Kuta Gugung dan Dusun Lau Kawar
8	Gudang Konco	Desa Jandi Meriah	263	934	461	473	94	0	39	10	Desa Mardinding
9	GPDI Ndokum Siroga	Simpang Empat	160	516	263	253	46	1	55	8	Desa Kuta Tengah
	Jumlah		2,592	9,318	4,616	4,702	532	70	777	193	

Sumber: Media Center Penanganan Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Sinabung, 2016

D. Kondisi Umum Siosar

Lokasi penelitian ini berada di Hutan Siosar yang sebelumnya merupakan kawasan hutan ini dijadikan lokasi resmi dari pemerintah untuk relokasi masyarakat Gunung Sinabung, lahan yang letaknya sangat terpencil ini sudah mendapat izin secara resmi dan merupakan satu-satunya alternatif lokasi perancangan untuk permukiman relokasi masyarakat Gunung Sinabung.

Secara geografis Siosar ini terletak di 02°58'56.9"LU dan 98°30'18.5"BT, dengan jarak sekitar 23,7 Km ke Gunung Sinabung, dan jarak ke Kabanjahe yaitu sekitar 17 Km. Adapun batas-batas wilayah Siosar ini yaitu :

1. Dari sebelah Utara yaitu berbatasan dengan Kec. Tigapanah
2. Dari sebelah Selatan yaitu berbatasan dengan Kec. Merek
3. Dari sebelah Timur yaitu berbatasan Hutan Pinus, dan
4. Dari sebelah Barat yaitu berbatasan dengan Hutan Lindung.

1. Sejarah Singkat Kawasan Siosar

Tanggal 27 Agustus 2010 menjadi hari yang menegangkan bagi warga di sekitar gunung Sinabung akibat aktivitas vulkanis gunung Sinabung yang mulai mengeluarkan asab dan abu vulkanisnya. Kejadian ini mengakibatkan warga di sekitar gunung Sinabung harus pindah ke pengungsian untuk menghindari asap dan abu vulkanis dari aktivitas vulkanik. Dari kejadian ini maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turun tangan untuk membantu warga sekitar. Relokasi ini berada di kawasan hutan produksi di Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sekitar 17 km dari kota Kabanjahe, ibu kota Kabupaten Karo. Penggunaan lahan dan akses jalan pada kawasan hutan produksi tetap Siosar, dan hutan lindung sekitar 458,8 hektare.

Siosar sendiri adalah kawasan hunian baru yang sebelumnya merupakan kawasan hutan. TNI adalah pihak yang oleh masyarakat dianggap berperan besar dalam pembukaan kawasan pemukiman ini. Dilihat dari topografinya, Siosar adalah kawasan perbukitan yang dengan posisinya memiliki potensi

sebagai kawasan wisata. Beberapa puncak gunung yang memiliki pemandangan yang indah dapat dinikmati dari kawasan ini.

Pada saat upaya pembukaan kawasan ini, aparaturnya dalam hal ini TNI buka tidak mengalami banyak kendala. Mulai dari kondisi alam yang berupa perbukitan dan minimnya akses jalan ke lokasi adalah sebagian dari kendala yang dihadapi. Tidak itu saja, hambatan yang berbau mistis juga muncul. Salah satu dari hal yang berbau mistis berdasarkan penuturan para pekerja yang terlibat dalam pembangunan kawasan perumahan Siosar dan diamininya oleh masyarakat yang sudah menetap adalah Pohon Keramat yang berada di sebelah kiri jalan masuk menuju Siosar. Dari penuturan beberapa orang, pohon ini telah berulang kali diupayakan ditumbang dengan bantuan alat berat namun selalu gagal. Akhirnya tanah disekeliling pohon dikeruk dengan harapan pohon akan meranggas dan akhirnya akan mati dengan sendirinya.

Mengingat bahwa kawasan Siosar ini merupakan kawasan relokasi pengungsi, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah merekrut fasilitator pendamping bagi masyarakat. Tugas para fasilitator tersebut adalah sebagai tenaga pendamping yang membantu masyarakat dalam mempersiapkan berbagai keperluan untuk hidup di kawasan baru.

Sampai dengan saat ini, dalam perjalanannya Siosar juga telah menjadi kawasan yang oleh banyak kalangan sering dijadikan objek kunjungan. Hanya saja mengingat pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan masih belum dilakukan, maka kunjungan orang luar tersebut sifatnya menjadi hanya sekedar ingin tahu Siosar saja. Semoga kehidupan masyarakat Erupsi Gunung Sinabung yang sudah tinggal di kawasan relokasi Siosar menjadi lebih baik.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kebijakan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung yang telah dilaksanakan di Desa Siosar Kecamatan Merek Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara oleh Pemerintah sudah dapat dikatakan tercapai berdasarkan tujuan dari kebijakan relokasi tersebut. Berdasarkan evaluasi konteks (*Context*) kebijakan relokasi sudah tercapai karena kebijakan ini mendapat dukungan dari lingkungan fisik ketersediaan lahan sebagai lahan relokasi, dukungan dari masyarakat masyarakat sebagai sasaran kebijakan dan dukungan anggaran dari pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan relokasi. Meskipun dalam proses pembangunan pemukiman penduduk mengalami kesulitan dikarenakan lahan merupakan bekas hutan lindung yang harus dibuka dan merupakan daerah resapan air.
2. Kebijakan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung dievaluasi berdasarkan masukan (*input*) kebijakan sudah tercapai dilihat dari pedoman pelaksanaan relokasi, dan kebijakan ini juga merupakan salah satu kebijakan jangka panjang untuk penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung. Dalam perencanaan

pembagian lahan dan rumah hunian dianggap sudah merata dikarenakan setiap kepala rumah tangga yang memiliki syarat mendapat rumah dan lahan pertanian yang sama.

3. Kebijakan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung dievaluasi berdasarkan proses (*process*) kebijakan ini dianggap sudah tercapai dalam perencanaannya, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Respon masyarakat dalam kebijakan ini juga terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam membantu TNI-AD dan BPBD Kabupaten karo untuk pembangunan bangunan dan lahan di tempat relokasi. Namun dalam pelaksanaan pembangunan kebijakan ini dianggap tidak tercapai dalam segi waktu pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan Surat Presiden Nomor 21 tentang Percepatan Penanggulanagn Bencana Erupsi Gunung Sinabung kebijakan relokasi ini ditargetkan selesai sampai pada tanggal 31 Desember 2016 sedangkan pada proses kebijakan ini belum selesai secara menyeluruh sampai juni 2016 terkhusus dalam penyediaan bibit untuk lahan pertanian.
4. Kebijakan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung dievaluasi berdasarkan hasil (*output*) kebijakan ini dianggap sudah tercapai karena target dari kebijakan ini untuk membangun pemukiman relokasi sebanyak 370 unit bangunan untuk tiga Desa yang direlokasi dan lahan pertanian. hasil kebijakan yang lain juga merupakan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung keberlangsungan hidup Masyarakat yang direlokasi seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun dalam segi biaya pembangunan sarana dan prasarana di tempat relokasi kurang efisien dalam biaya yang tidak

sebanding dibandingkan dengan tingkat kebutuhan dari sarana maupun prasarana tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis terhadap permasalahan kebijakan Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Di Desa Siosar Kecamatan Merek Kabupaten Karo Sumatera Utara, maka peneliti memberi saran terkait dengan Kebijakan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Desa Siosar Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebagai berikut:

1. BPBD Kabupaten Karo mensosialisasikan dengan jelas kepada masyarakat mengenai pemakaian lahan pertanian, sehingga masyarakat tidak merasa bingung dalam izin menggunakan lahan yang sudah siap untuk ditanami. Keluhan masyarakat karena belum ada intruksi pemerintah dalam penggunaan lahan oleh sebab itu ada ketakutan menyalahi aturan untuk menggunakan lahan.
2. Percepatan kinerja dan tanggap darurat dari BPBD Kabupaten Karo terhadap bencana alam dan pengadaan bibit dan modal alat pertanian kepada masyarakat yang direlokasi agar dapat segera berkerja dan untuk mendukung masyarakat untuk mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung. Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Jakarta: Bumi Aksara.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Badrujaman, Aip. (2009). *Diktat teori dan praktek evaluasi program bimbingan dan konseling*. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Komunikasi dan Informatika RI. 2007. *Penanggulangan Bencana Alam dalam Perspektif Agama di Indonesia*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI
- Dunn, William N. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Edisi Revisi. Bandung: PT Rosdakarya.
- Evaluasi Percepatan Penanganan Dan Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung*. Kabanjahe :
- Fahmi, Irham. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua 1996. Jakarta: Balai Pustaka 3685.
- Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Terdampak Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara*. Jakarta :

- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* .Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2009. *Publik Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo
- Nurjanna, Dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karo.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD*. Jakarta :
- Peraturan pemerintah dalam negeri No. 46 tahun 2008 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.*
- Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.*
- Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.*
- Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.*
- Purnomo, Hadi Dkk. 2010 *Manajemen Bencana*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Ridho, R. All. 2001. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung.: Alumni.
- Siagian, Sondang P. 1970. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Mosagung.
- Sudjana, Nana. 2006. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & G*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.*
- Wijayanto,Dian. 2012. *PengantarManajemen*. Jakarta: GramediaPustakaUtama.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

Yudohusodo, Siswono dkk. 1991. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat, UP*. Jakarta : Bharakerta.

Jurnal :

Loegman, Agoes. 2010. *Erupsi lima Gunung api*. Jakarta. Bulletin Vulkanologi dan Bencana Geologi.

Tarigan, Agustoni, 2016. *Evaluasi kesesuaian lahan kentang di kawasan relokasi siosar kabupaten karo*.Medan. Fakultas Pertanian USU

Website:

<http://mediacenter.or.id/respon/reports/view/205#.VikWJIXMbIU> Diakses pada 15 oktober 2015 pukul 21.45 WIB

<http://ppsp.nawasis.info/.../kab.karo/BAB%25011%2520BP%2520Gambaran%2520Umum.doc> // diakses pada 14 juni 2016 pukul 20.05 WIB

<http://print.kompas.com/baca/2015/09/25/Warga-Bekerah-Enggan-Pindah%2c-Fasilitas-Relokasi-Belum-memadai//> Diakses pada 15 januari 2015 pukul 21.35 WIB

http://www.Karokab.go.id/in/attachments/article/4089/KBK_361215BPBD2015.pdf Diakses pada 12 November 2015 pukul 20.05 WIB

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/11/01/126947/pemkab-Karo-tindaklanjuti-instruksi-presiden-jokowi/#.VX3eH0ZfOJ8> Diakses pada 12 Januari 2016 pukul 21.15 WIB

Supriyatna, Yayat. 2007. *Analisis Dampak Bencana terhadap Perekonomian Indonesia dengan Pendekatan SNSE.*, (online), <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20285082-T29478-Analisis%20dampak.pdf> diakses 14 desember 2015 pukul 17.35 WIB

www.Karokab.go.id Diakses pada 12 November 2015 pukul 20.00 WIB

<http://news.okezone.com/read/2016/06/15/337/1415687/melihat-kembali-relokasi-gunung-sinabung> diakses pada 6 Desember 2016 pukul 19,00 WIB